

LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH**

KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN 2026

| | | |
|----------------------------|---|---|
| Nama Pemda | : | Pemerintah Kabupaten Lamongan |
| OPD yang Dinilai | : | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) |
| Urusan Pemerintahan | : | Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan |
| Tahun Penilaian | : | 2026 |
| Sumber Data | : | Renstra BAPPERIDA Kabupaten Lamongan Tahun 2025–2029; Renja BAPPERIDA Tahun 2026 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lamongan (BAPPERIDA Kab. Lamongan) memiliki peran penting dalam mengarahkan dan menyelenggarakan pembangunan di wilayah Kabupaten Lamongan. Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab atas urusan perencanaan, penelitian, dan pengembangan, BAPPERIDA Kab. Lamongan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan dan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Lamongan.

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, BAPPERIDA Kab. Lamongan memandang pentingnya pengelolaan risiko sebagai bagian integral dari proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Mengingat kompleksitas dan dinamika lingkungan kerja yang terus berubah, pengelolaan risiko menjadi landasan yang krusial dalam memastikan keberhasilan program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh BAPPERIDA Kab. Lamongan.

Sebagai tanggapan terhadap tuntutan tersebut, BAPPERIDA Kab. Lamongan telah mengembangkan kebijakan pengelolaan risiko yang komprehensif dan terarah. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko-risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan program pembangunan, tetapi juga untuk merumuskan strategi mitigasi yang tepat guna mengurangi dampak negatif dari risiko-risiko tersebut.

Kebijakan pengelolaan risiko perangkat daerah ini dibangun berdasarkan prinsip-prinsip manajemen risiko yang terpercaya serta sesuai dengan regulasi dan pedoman yang berlaku di tingkat nasional dan daerah. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya menjadi panduan bagi internal BAPPERIDA Kab. Lamongan, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan bertanggung jawab.

Dalam konteks ini, penyusunan laporan pengelolaan risiko BAPPERIDA Kab. Lamongan menjadi suatu keharusan guna mengevaluasi kinerja pengelolaan risiko yang telah dilakukan, mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi, serta menyusun rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Laporan ini akan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dan mencapai tujuan pembangunan yang lebih berkelanjutan di Kabupaten Lamongan.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025–2029.

4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
6. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja BAPPERIDA Kabupaten Lamongan;

C. Maksud dan Tujuan

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk:

- Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah;
- Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja;
- Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif;
- Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi;
- Meningkatkan ketahanan organisasi;
- Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. Ruang Lingkup

Manajemen risiko pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi:

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya;
- Identifikasi risiko;
- Analisis risiko;
- Evaluasi risiko;
- Pengendalian risiko;
- Pemantauan dan telaah ulang;
- Koordinasi dan komunikasi.

BAB II PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Berdasarkan hasil survei persepsi yang dilakukan pada BAPPERIDA Kabupaten Lamongan, maka diperoleh gambaran tentang kondisi lingkungan pengendalian pada awal periode tahun 2026. Secara umum, semua aspek pada lingkungan pengendalian saat ini sudah diterapkan dengan baik dan memadai, sebagaimana berikut ini:

Tabel 1. Hasil Survei Persepsi Kondisi Lingkungan Pengendalian

| No | Aspek | Kategori |
|----|---|----------|
| A | Penegakan Integritas dan Nilai Etika | Memadai |
| B | Komitmen Terhadap Kompetensi | Memadai |
| C | Kepemimpinan yang Kondusif | Memadai |
| D | Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan | Memadai |
| E | Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat | Memadai |
| F | Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM | Memadai |
| G | Perwujudan Peran APIP yang Efektif | Memadai |
| H | Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait | Memadai |

B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan hasil survei persepsi dan analisis pada sumber data yang dilakukan pada BAPPERIDA Kabupaten Lamongan pada awal periode tahun 2026, meskipun secara umum lingkungan pengendalian sudah diterapkan dengan baik, namun terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan agar mendukung penciptaan budaya pengendalian risiko yang lebih efektif di pemerintah daerah. Oleh karena itu, berikut adalah rencana perbaikan lingkungan pengendalian yang diusulkan:

Tabel 2. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian BAPPERIDA Kabupaten Lamongan Tahun 2026

| No | Aspek / Klasifikasi | Kondisi / Kelemahan Saat Ini | Rencana Tindak Perbaikan | Penanggung Jawab | Target Waktu |
|----|--------------------------------------|--|--|----------------------|---------------|
| A | Penegakan Integritas dan Nilai Etika | Sosialisasi kode etik dan mekanisme penanganan pelanggaran belum sepenuhnya optimal. | 1. Penyusunan/pembaruan SK Kode Etik dan pakta integritas yang ditandatangani seluruh pegawai. 2. Sosialisasi berkala nilai etika dan integritas oleh pimpinan. 3. Pembentukan/penunjukan unit penerima pengaduan pelanggaran etika. 4. Penyusunan mekanisme sanksi dan tindak lanjut pelanggaran kode etik secara tertulis. | Sekretaris BAPPERIDA | Desember 2026 |

| No | Aspek / Klasifikasi | Kondisi / Kelemahan Saat Ini | Rencana Tindak Perbaikan | Penanggung Jawab | Target Waktu |
|----------|---|---|--|----------------------|---------------|
| B | Komitmen Terhadap Kompetensi | Pemenuhan pelatihan teknis manajemen risiko bagi seluruh pegawai belum maksimal. | 1. Penyusunan peta kompetensi jabatan seluruh posisi di BAPPERIDA. 2. Pelaksanaan pelatihan pengelolaan risiko bagi pegawai BAPPERIDA. 3. Penyusunan rencana pengembangan kompetensi tahunan yang ditetapkan dalam dokumen formal. 4. Evaluasi penempatan pegawai berdasarkan kesesuaian kompetensi. | Sekretaris BAPPERIDA | Desember 2026 |
| C | Kepemimpinan yang Kondusif | Penerapan manajemen risiko dalam proses pengambilan keputusan belum sepenuhnya optimal. | 1. Penetapan kebijakan pengelolaan risiko BAPPERIDA. 2. Penyusunan profil risiko dan integrasi dalam dokumen penilaian risiko. 3. Penyelenggaraan rapat koordinasi pengelolaan risiko triwulanan. 4. Cascading sasaran strategis ke seluruh unit/bidang secara tertulis. | Sekretaris BAPPERIDA | Desember 2026 |
| D | Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan | - | - | - | - |
| E | Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat | - | - | - | - |
| F | Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM | Integrasi aspek pengelolaan risiko ke dalam mekanisme penilaian kinerja belum optimal. | 1. Implementasi SOP pengelolaan SDM yang lengkap dari rekrutmen hingga pemberhentian. 2. Penetapan mekanisme reward/punishment yang mempertimbangkan pengelolaan risiko. 3. Review dan penyesuaian insentif pegawai berdasarkan beban kerja dan capaian kinerja. 4. Pengalokasian anggaran pelatihan SDM yang memadai dalam DPA BAPPERIDA. | Sekretaris BAPPERIDA | Desember 2026 |
| G | Perwujudan Peran APIP yang Efektif | - | - | - | - |
| H | Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait | - | - | - | - |

BAB III PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

A. Penetapan Konteks/Tujuan

| Konteks Strategis OPD | |
|-----------------------|--|
| Nama Pemda | Pemerintah Kabupaten Lamongan |
| Tahun Penilaian | 2026 |
| Periode yang Dinilai | 2026 |
| Urusan Pemerintahan | Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan |
| OPD yang Dinilai | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) |
| Sumber Data | Renstra BAPPERIDA Kabupaten Lamongan Tahun 2025–2029 |
| Tujuan Strategis | Terwujudnya Kinerja Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Kebijakan yang Berkualitas |
| Sasaran Strategis | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah 3. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian/Pengembangan sebagai Rekomendasi Kebijakan yang Inovatif |
| IKU Renstra OPD | <ol style="list-style-type: none"> 4. Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Daerah (%) 5. Persentase Indikator Kinerja RPJMD yang Tercapai (%) 6. Persentase Indikator Program PD yang Tercapai (%) 7. Indeks Inovasi Daerah (Predikat) 8. Nilai SAKIP BAPPERIDA 9. Nilai Manajemen Risiko 10. Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) 11. Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan landasan implementasi (%) |

| Konteks Operasional OPD | |
|--|--|
| Sumber Data | Renja BAPPERIDA Kabupaten Lamongan Tahun 2026 |
| Program BAPPERIDA dan Kegiatan Utama | <p>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan • Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah • Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah • Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah <p>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia • Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA • Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan <p>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan • Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan • Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan • Pengembangan Inovasi dan Teknologi <p>PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan • Inovasi dan Inovasi |
| Jumlah Risiko Operasional yang Dinilai | 72 (tujuh puluh dua) risiko operasional pada 4 program dan 13 kegiatan utama |

B. Hasil Identifikasi Risiko

Risiko Strategis Organisasi (RSO)

| Uraian Risiko | Kode Risiko | Pemilik Risiko | Sebab | Sumber | C/UC | Dampak | Pihak Terkena |
|---|-----------------|------------------|---|----------|------|---|--------------------------------|
| Monitoring kinerja pembangunan pemerintah daerah tidak berjalan optimal | RSO.26.36.10.01 | Kepala BAPPERIDA | Sistem aplikasi monitoring capaian kinerja tidak berjalan maksimal | Internal | C | Perkembangan capaian kinerja pembangunan daerah/perangkat daerah tidak dapat dipantau, dan evaluasi tidak dapat dilaksanakan secara optimal sebagai dasar pengambilan kebijakan | Pemerintah Daerah & Masyarakat |
| Ketidak konsistenan antara dokumen perencanaan dengan penganggaran pemerintah daerah | RSO.26.36.10.02 | Kepala BAPPERIDA | Kurang optimalnya koordinasi antara tim perencanaan dengan penganggaran. Adanya perubahan kebijakan secara mendadak terkait penganggaran. | Internal | C | Program prioritas pemerintah daerah tidak mendapatkan dukungan anggaran yang maksimal | Pemerintah Daerah & Masyarakat |
| Program prioritas pemerintah daerah tidak dapat dilaksanakan | RSO.26.36.10.03 | Kepala BAPPERIDA | Adanya kebijakan efisiensi dan realokasi anggaran. Lemahnya fungsi sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang sektoral | Internal | C | Reputasi Kepala Daerah dan Pemerintah Daerah menurun | Bupati & Pemerintah Daerah |
| Ketidakselarasan dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perangkat daerah | RSO.26.36.10.04 | Kepala BAPPERIDA | Kurang optimalnya fungsi pendampingan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Internal | C | Kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah menurun | Pemerintah Daerah |
| Fungsi pelayanan BAPPERIDA tidak berjalan dengan optimal | RSO.26.36.10.05 | Kepala BAPPERIDA | Kurangnya kapasitas SDM Perencana dalam pendampingan perencanaan | Internal | C | Kepuasan masyarakat/pengguna layanan BAPPERIDA rendah dan menurunnya reputasi pemerintah daerah | Pemerintah Daerah & Masyarakat |
| Manajemen internal perangkat daerah tidak efisien | RSO.26.36.10.06 | Kepala BAPPERIDA | Lemahnya sistem informasi teknologi yang digunakan | Internal | C | Pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPERIDA terhambat dan menurunnya reputasi perangkat daerah | BAPPERIDA & Pemerintah Daerah |
| Identifikasi risiko dan kegiatan pengendalian perangkat daerah tidak dapat dilaksanakan | RSO.26.36.10.07 | Kepala BAPPERIDA | Lemahnya koordinasi dan sistem pengendalian internal perangkat daerah | Internal | C | Terjadinya risiko yang tidak diinginkan dan menurunnya reputasi serta kinerja perangkat daerah | BAPPERIDA & Pemerintah Daerah |
| Rekomendasi kebijakan hasil penelitian tidak berkualitas | RSO.26.36.10.08 | Kepala BAPPERIDA | Penelitian tidak didasarkan pada isu dan permasalahan yang ada. Metodologi penelitian tidak sesuai dengan kaidah | Internal | C | Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan tidak dapat ditindaklanjuti | Pemerintah Daerah & Masyarakat |

| Uraian Risiko | Kode Risiko | Pemilik Risiko | Sebab | Sumber | C/UC | Dampak | Pihak Terkena |
|---|-----------------|------------------|--|----------|------|---|--------------------------------|
| Inovasi yang dikembangkan unit pelayanan publik/perangkat daerah tidak mendapatkan legitimasi dan tidak berkelanjutan | RSO.26.36.10.09 | Kepala BAPPERIDA | Tingkat kematangan inovasi yang rendah dan kurangnya dukungan komitmen dari pejabat pemangku kepentingan | Internal | C | Rendahnya kualitas pelayanan publik pemerintah daerah | Pemerintah Daerah & Masyarakat |

Risiko Operasional Organisasi (ROO)

| Kegiatan | Tahap | Uraian Risiko | Skenario Risiko | Kode Risiko | Pemilik | Sebab | C/UC | Dampak | Pihak Terkena |
|--------------------------------------|-----------------------------|---|---|-----------------|--|---|------|--|---|
| Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Pelaksanaan Kegiatan | Risiko Operasional Kegiatan: Ketidaksiesuaian antara perencanaan dan pendanaan | - | ROO.26.36.10.01 | Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi | Kurangnya koordinasi antara tim perencanaan dan keuangan, ketidakpastian anggaran, serta perubahan kebijakan yang mendadak. | C | Tidak tercapainya kinerja atau program yang direncanakan, ketidakpastian anggaran, dan penurunan kepercayaan stakeholder. | Pemerintah Daerah |
| Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Pelaksanaan Kegiatan | Risiko Kemitraan: Kurangnya partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan | - | ROO.26.36.10.02 | Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi | Kurangnya intensitas sosialisasi program prioritas pembangunan daerah | C | Perencanaan pembangunan kurang berdampak bagi masyarakat | Masyarakat |
| Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Perencanaan dan Pelaksanaan | Risiko Operasional Kegiatan: Tidak terakomodirnya usulan masyarakat dalam dokumen perencanaan | - | ROO.26.36.10.03 | Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi | Usulan masyarakat yang terlalu banyak, serta forum perencanaan yang ada tidak mampu mengakomodasi semua usulan masyarakat | C | Terjadinya protes dan konflik di masyarakat, dan menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah | Pemerintah Daerah & Masyarakat |
| Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Perencanaan | Risiko Kemitraan: Kegiatan hibah dan bantuan tidak diketahui kelayakan dan ketepatan sarannya | - | ROO.26.36.10.04 | Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi | Usulan program hibah dan bantuan tidak disertai dengan proposal sesuai dengan ketentuan yang berlaku | C | Pemborosan anggaran dan potensi kerugian keuangan daerah | Pemerintah Daerah & Masyarakat |
| Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Perencanaan Penganggaran | Risiko Fraud: Risiko pemecahan anggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa | PPTK sengaja menyusun paket pekerjaan untuk pengadaan barang dan jasa dengan memecah nilai pengadaan di bawah | ROO.26.36.10.05 | Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi | Kurangnya integritas PPTK sehingga sengaja melakukan paket pekerjaan dengan niat untuk menghindari lelang | C | 1. Tidak efisiennya penggunaan anggaran. 2. Potensi pelanggaran aturan pengadaan dan temuan audit. 3. Hilangnya kepercayaan publik terhadap proses | Pemerintah Daerah, BAPPERIDA dan Masyarakat |

| Kegiatan | Tahap | Uraian Risiko | Skenario Risiko | Kode Risiko | Pemilik | Sebab | C/U C | Dampak | Pihak Terkena |
|---|----------------------|--|--|-----------------|--|---|-------|--|---------------------------------|
| | | | Rp 200 Juta yang bertujuan untuk menghindari tender atau dilakukan dengan mekanisme pengadaan langsung Korupsi (Perbuatan Curang) | | | | | pengadaan yang transparan. | |
| Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Perencanaan | Risiko Operasional Kegiatan: Kurangnya kualitas analisis data | - | ROO.26.36.10.06 | Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi | Kurangnya keahlian analisis data, keterbatasan akses data yang akurat, atau kurangnya penggunaan teknologi informasi. | C | Kesalahan interpretasi data, perencanaan yang tidak berbasis bukti, dan penurunan kualitas keputusan perencanaan. | Pemerintah Daerah & Masyarakat |
| Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Pelaksanaan Kegiatan | Risiko Kemitraan: Data yang dihasilkan oleh produsen data kurang berkualitas | - | ROO.26.36.10.07 | Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi | Proses pengumpulan data tidak mendapatkan pendampingan dari wali data maupun instansi pembina | C | Pengambilan keputusan dalam kebijakan pembangunan tidak tepat sasaran, dan proses evaluasi pembangunan terhambat | Pemerintah Daerah & Masyarakat |
| Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Pelaporan | Risiko Fraud: Pengeluaran kegiatan fiktif | PPTK melakukan pertanggungjawaban belanja barang dan jasa tidak sesuai dengan realisasi untuk kepentingan pribadi/golongan Korupsi (Perbuatan Curang) | ROO.26.36.10.08 | Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi | Kurangnya integritas dan intervensi pihak lain untuk kepentingan pribadi/golongan | C | 1. Kerugian keuangan daerah karena anggaran terserap tanpa kegiatan nyata. 2. Berkurangnya dana yang seharusnya digunakan untuk program prioritas. 3. Menurunnya kredibilitas lembaga akibat potensi temuan hukum/audit. | Pemerintah Daerah dan BAPPERIDA |
| Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Pelaksanaan Kegiatan | Risiko Operasional Kegiatan: Kurangnya sistem pengendalian dan evaluasi | - | ROO.26.36.10.09 | Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi | Rendahnya kualitas sistem informasi pengendalian dan evaluasi yang digunakan | C | Ketidakjelasan terkait pencapaian sasaran, kesulitan dalam perbaikan kebijakan, dan penurunan akuntabilitas. | Pemerintah Daerah & Masyarakat |
| Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Pelaksanaan Kegiatan | Risiko Kemitraan: Pelaporan evaluasi pembangunan tidak tepat waktu | - | ROO.26.36.10.10 | Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi | Masih lemahnya koordinasi dengan perangkat daerah dalam pelaporan capaian kinerja pembangunan | C | Terhambatnya proses evaluasi kinerja dan kebijakan pembangunan daerah | Pemerintah Daerah |

| Kegiatan | Tahap | Uraian Risiko | Skenario Risiko | Kode Risiko | Pemilik | Sebab | C/U C | Dampak | Pihak Terkena |
|--|----------------------|---|---|-----------------|--|--|-------|--|---|
| Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Pelaporan | Risiko Fraud: Pertanggungjawaban biaya kegiatan tidak sesuai dengan realisasi di lapangan | PPTK menyusun dokumen pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan, namun dokumen yang diajukan sebagai pertanggung jawaban kegiatan tidak sesuai dengan realisasi kegiatannya atau hanya sebagai formalitas. Korupsi (Perbuatan Curang) | ROO.26.36.10.11 | Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi | Pengujian pertanggung jawaban baru sebatas pengujian formal/administratif sedangkan pengujian substansi belum dilakukan | C | 1. Laporan keuangan tidak akurat dan berpotensi menimbulkan temuan audit. 2. Risiko sanksi administrasi dan hukum. 3. Menurunnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran. | Kepala & Pegawai BAPPERIDA |
| Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Pelaksanaan Kegiatan | Risiko Operasional Kegiatan: Sistem Informasi Pemerintah Daerah tidak dapat digunakan secara maksimal | - | ROO.26.36.10.12 | Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi | Terjadinya kendala teknis dan pemeliharaan oleh pengelola sistem | C | Proses perencanaan pembangunan menjadi terhambat | Pemerintah Daerah |
| Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Pelaksanaan Kegiatan | Risiko Kemitraan: Mitra Perencanaan Pembangunan mengalami kendala dalam melakukan usulan melalui SIPD | - | ROO.26.36.10.13 | Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi | Kurangnya pemahaman dan intensitas sosialisasi kepada mitra perencanaan pembangunan (DPRD, Desa, dan Organisasi Masyarakat) | C | Proses perencanaan pembangunan menjadi terhambat | Pemerintah Daerah |
| Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Pelaporan | Risiko Fraud: Kegiatan perjalanan dinas tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan | Pejabat/pegawai melaporkan kegiatan perjalanan dinas namun tidak terdapat pelaksanaan kegiatan secara riil dengan maksud untuk menyerap anggaran kegiatan yang sudah direncanakan. Korupsi (Perbuatan Curang) | ROO.26.36.10.14 | Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi | Kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan perjalanan dinas dan kurangnya integritas pegawai dalam melaksanakan tugas perjalanan dinas. | C | 1. Terjadinya pemborosan anggaran daerah. 2. Berkurangnya kepercayaan publik terhadap kinerja BAPPERIDA. 3. Akuntabilitas keuangan dan kinerja OPD menurun. 4. Potensi temuan pemeriksaan oleh APIP/BPK. | Pemerintah Daerah, BAPPERIDA dan Masyarakat |

| Kegiatan | Tahap | Uraian Risiko | Skenario Risiko | Kode Risiko | Pemilik | Sebab | C/U C | Dampak | Pihak Terkena |
|--|-----------------------------|--|--|-----------------|--|---|-------|--|---|
| Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Perencanaan dan Pelaksanaan | Risiko Operasional Kegiatan: Program prioritas bidang pemerintahan dan pembangunan manusia tidak terakomodir dalam dokumen perencanaan | - | ROO.26.36.10.15 | Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Kurang optimalnya sinkronisasi dan harmonisasi program prioritas bidang pemerintahan dan pembangunan manusia | C | Program prioritas pembangunan daerah tidak tidak terlaksana | Kepala Daerah & Perangkat Daerah |
| Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Perencanaan dan Pelaksanaan | Risiko Kemitraan: Dokumen perencanaan perangkat daerah tidak sesuai dengan ketentuan | - | ROO.26.36.10.16 | Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Belum optimalnya proses pendampingan kepada perangkat daerah | C | Dokumen perencanaan disusun tidak tepat waktu yang berakibat pada tidak optimalnya Dana Transfer ke Daerah | Pemerintah Daerah |
| Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Perencanaan Penganggaran | Risiko Fraud: Risiko pemecahan anggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa | PPTK sengaja menyusun paket pekerjaan untuk pengadaan barang dan jasa dengan memecah nilai pengadaan di bawah Rp 200 Juta yang bertujuan untuk menghindari tender atau dilakukan dengan mekanisme pengadaan langsung Korupsi (Perbuatan Curang) | ROO.26.36.10.17 | Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Kurangnya integritas PPTK sehingga sengaja melakukan paket pekerjaan dengan niat untuk menghindari lelang | C | 1. Tidak efisiennya penggunaan anggaran. 2. Potensi pelanggaran aturan pengadaan dan temuan audit. 3. Hilangnya kepercayaan publik terhadap proses pengadaan yang transparan. | Pemerintah Daerah, BAPPERIDA dan Masyarakat |
| Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Pelaporan | Risiko Fraud: Pengeluaran kegiatan fiktif | PPTK melakukan pertanggungjawaban belanja barang dan jasa tidak sesuai dengan realisasi untuk kepentingan pribadi/golongan Korupsi (Perbuatan Curang) | ROO.26.36.10.18 | Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Kurangnya integritas dan intervensi pihak lain untuk kepentingan pribadi/golongan | C | 1. Kerugian keuangan daerah karena anggaran terserap tanpa kegiatan nyata. 2. Berkurangnya dana yang seharusnya digunakan untuk program prioritas. 3. Menurunnya kredibilitas lembaga akibat potensi temuan hukum/audit. | Pemerintah Daerah dan BAPPERIDA |
| Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Pelaporan | Risiko Fraud: Pertanggungjawaban biaya kegiatan tidak sesuai dengan realisasi di lapangan | PPTK menyusun dokumen pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan, namun dokumen yang diajukan sebagai | ROO.26.36.10.19 | Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Pengujian pertanggung jawaban baru sebatas pengujian formal/administratif sedangkan pengujian substansi belum dilakukan | C | 1. Laporan keuangan tidak akurat dan berpotensi menimbulkan temuan audit. 2. Risiko sanksi administrasi dan hukum. 3. Menurunnya akuntabilitas dan | Kepala & Pegawai BAPPERIDA |

| Kegiatan | Tahap | Uraian Risiko | Skenario Risiko | Kode Risiko | Pemilik | Sebab | C/U C | Dampak | Pihak Terkena |
|---|-----------------------------|--|--|-----------------|--|--|-------|--|---|
| | | | pertanggung jawaban kegiatan tidak sesuai dengan realisasi kegiatannya atau hanya sebagai formalitas. Korupsi (Perbuatan Curang) | | | | | transparansi pengelolaan anggaran. | |
| Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Pelaporan | Risiko Fraud: Kegiatan perjalanan dinas tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan | Pejabat/pegawai melaporkan kegiatan perjalanan dinas namun tidak terdapat pelaksanaan kegiatan secara riil dengan maksud untuk menyerap anggaran kegiatan yang sudah direncanakan. Korupsi (Perbuatan Curang) | ROO.26.36.10.20 | Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan perjalanan dinas dan kurangnya integritas pegawai dalam melaksanakan tugas perjalanan dinas. | C | 1. Terjadinya pemborosan anggaran daerah. 2. Berkurangnya kepercayaan publik terhadap kinerja BAPPERIDA. 3. Akuntabilitas keuangan dan kinerja OPD menurun. 4. Potensi temuan pemeriksaan oleh APIP/BPK. | Pemerintah Daerah, BAPPERIDA dan Masyarakat |
| Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Perencanaan dan Pelaksanaan | Risiko Operasional Kegiatan: Program prioritas bidang pemerintahan dan pembangunan manusia tidak terakomodir dalam dokumen perencanaan | - | ROO.26.36.10.21 | Kepala Bidang Perekonomian dan SDA | Kurang optimalnya sinkronisasi dan harmonisasi program prioritas bidang perekonomian dan SDA | C | Program prioritas pembangunan daerah tidak terlaksana | Kepala Daerah & Perangkat Daerah |
| Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Perencanaan dan Pelaksanaan | Risiko Kemitraan: Dokumen perencanaan perangkat daerah tidak sesuai dengan ketentuan | - | ROO.26.36.10.22 | Kepala Bidang Perekonomian dan SDA | Belum optimalnya proses pendampingan kepada perangkat daerah | C | Dokumen perencanaan disusun tidak tepat waktu yang berakibat pada tidak optimalnya Dana Transfer ke Daerah | Kepala Daerah & Perangkat Daerah |
| Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Perencanaan Penganggaran | Risiko Fraud: Risiko pemecahan anggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa | PPTK sengaja menyusun paket pekerjaan untuk pengadaan barang dan jasa dengan memecah nilai pengadaan di bawah Rp 200 Juta yang bertujuan untuk menghindari tender atau dilakukan | ROO.26.36.10.23 | Kepala Bidang Perekonomian & SDA | Kurangnya integritas PPTK sehingga sengaja melakukan paket pekerjaan dengan niat untuk menghindari lelang | C | 1. Tidak efisiensi penggunaan anggaran. 2. Potensi pelanggaran aturan pengadaan dan temuan audit. 3. Hilangnya kepercayaan publik terhadap proses pengadaan yang transparan. | Pemerintah Daerah, BAPPERIDA dan Masyarakat |

| Kegiatan | Tahap | Uraian Risiko | Skenario Risiko | Kode Risiko | Pemilik | Sebab | C/U C | Dampak | Pihak Terkena |
|---|-----------|---|---|-----------------|----------------------------------|--|-------|--|---|
| | | | dengan mekanisme pengadaan langsung Korupsi (Perbuatan Curang) | | | | | | |
| Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Pelaporan | Risiko Fraud: Pengeluaran kegiatan fiktif | PPTK melakukan pertanggungjawaban belanja barang dan jasa tidak sesuai dengan realisasi untuk kepentingan pribadi/golongan Korupsi (Perbuatan Curang) | ROO.26.36.10.24 | Kepala Bidang Perekonomian & SDA | Kurangnya integritas dan intervensi pihak lain untuk kepentingan pribadi/golongan | C | 1. Kerugian keuangan daerah karena anggaran terserap tanpa kegiatan nyata. 2. Berkurangnya dana yang seharusnya digunakan untuk program prioritas. 3. Menurunnya kredibilitas lembaga akibat potensi temuan hukum/audit. | Pemerintah Daerah dan BAPPERIDA |
| Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Pelaporan | Risiko Fraud: Pertanggungjawaban biaya kegiatan tidak sesuai dengan realisasi di lapangan | PPTK menyusun dokumen pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan, namun dokumen yang diajukan sebagai pertanggung jawaban kegiatan tidak sesuai dengan realisasi kegiatannya atau hanya sebagai formalitas. Korupsi (Perbuatan Curang) | ROO.26.36.10.25 | Kepala Bidang Perekonomian & SDA | Pengujian pertanggung jawaban baru sebatas pengujian formal/administratif sedangkan pengujian substansi belum dilakukan | C | 1. Laporan keuangan tidak akurat dan berpotensi menimbulkan temuan audit. 2. Risiko sanksi administrasi dan hukum. 3. Menurunnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran. | Kepala & Pegawai BAPPERIDA |
| Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Pelaporan | Risiko Fraud: Kegiatan perjalanan dinas tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan | Pejabat/pegawai melaporkan kegiatan perjalanan dinas namun tidak terdapat pelaksanaan kegiatan secara riil dengan maksud untuk menyerap anggaran kegiatan yang sudah direncanakan. Korupsi (Perbuatan Curang) | ROO.26.36.10.26 | Kepala Bidang Perekonomian & SDA | Kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan perjalanan dinas dan kurangnya integritas pegawai dalam melaksanakan tugas perjalanan dinas. | C | 1. Terjadinya pemborosan anggaran daerah. 2. Berkurangnya kepercayaan publik terhadap kinerja BAPPERIDA. 3. Akuntabilitas keuangan dan kinerja OPD menurun. 4. Potensi temuan pemeriksaan oleh APIP/BPK. | Pemerintah Daerah, BAPPERIDA dan Masyarakat |

| Kegiatan | Tahap | Uraian Risiko | Skenario Risiko | Kode Risiko | Pemilik | Sebab | C/U C | Dampak | Pihak Terkena |
|---|-----------------------------|--|--|-----------------|---|---|-------|--|---|
| Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Perencanaan dan Pelaksanaan | Risiko Operasional Kegiatan: Program prioritas bidang pemerintahan dan pembangunan manusia tidak terakomodir dalam dokumen perencanaan | - | ROO.26.36.10.27 | Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Kurang optimalnya sinkronisasi dan harmonisasi program prioritas bidang infrastruktur dan kewilayahan | C | Program prioritas pembangunan daerah tidak tidak terlaksana | Kepala Daerah & Perangkat Daerah |
| Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Perencanaan dan Pelaksanaan | Risiko Kemitraan: Dokumen perencanaan perangkat daerah tidak sesuai dengan ketentuan | - | ROO.26.36.10.28 | Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Belum optimalnya proses pendampingan kepada perangkat daerah | C | Dokumen perencanaan disusun tidak tepat waktu yang berakibat pada tidak optimalnya Dana Transfer ke Daerah | Kepala Daerah & Perangkat Daerah |
| Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Perencanaan Penganggaran | Risiko Fraud: Risiko pemecahan anggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa | PPTK sengaja menyusun paket pekerjaan untuk pengadaan barang dan jasa dengan memecah nilai pengadaan di bawah Rp 200 Juta yang bertujuan untuk menghindari tender atau dilakukan dengan mekanisme pengadaan langsung Korupsi (Perbuatan Curang) | ROO.26.36.10.29 | Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Kurangnya integritas PPTK sehingga sengaja melakukan paket pekerjaan dengan niat untuk menghindari lelang | C | 1. Tidak efisiensi penggunaan anggaran. 2. Potensi pelanggaran aturan pengadaan dan temuan audit. 3. Hilangnya kepercayaan publik terhadap proses pengadaan yang transparan. | Pemerintah Daerah, BAPPERIDA dan Masyarakat |
| Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Pelaporan | Risiko Fraud: Pengeluaran kegiatan fiktif | PPTK melakukan pertanggungjawaban belanja barang dan jasa tidak sesuai dengan realisasi untuk kepentingan pribadi/golongan Korupsi (Perbuatan Curang) | ROO.26.36.10.30 | Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Kurangnya integritas dan intervensi pihak lain untuk kepentingan pribadi/golongan | C | 1. Kerugian keuangan daerah karena anggaran terserap tanpa kegiatan nyata. 2. Berkurangnya dana yang seharusnya digunakan untuk program prioritas. 3. Menurunnya kredibilitas lembaga akibat potensi temuan hukum/audit. | Pemerintah Daerah dan BAPPERIDA |
| Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Pelaporan | Risiko Fraud: Pertanggungjawaban biaya kegiatan tidak sesuai dengan realisasi di lapangan | PPTK menyusun dokumen pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan, namun dokumen yang diajukan sebagai pertanggung jawaban kegiatan tidak sesuai dengan | ROO.26.36.10.31 | Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Pengujian pertanggung jawaban baru sebatas pengujian formal/administratif sedangkan pengujian substansi belum dilakukan | C | 1. Laporan keuangan tidak akurat dan berpotensi menimbulkan temuan audit. 2. Risiko sanksi administrasi dan hukum. 3. Menurunnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran. | Kepala & Pegawai BAPPERIDA |

| Kegiatan | Tahap | Uraian Risiko | Skenario Risiko | Kode Risiko | Pemilik | Sebab | C/U C | Dampak | Pihak Terkena |
|--|-----------|--|--|-----------------|---|--|-------|--|---|
| | | | realisasi kegiatannya atau hanya sebagai formalitas. Korupsi (Perbuatan Curang) | | | | | | |
| Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Pelaporan | Risiko Fraud: Kegiatan perjalanan dinas tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan | Pejabat/pegawai melaporkan kegiatan perjalanan dinas namun tidak terdapat pelaksanaan kegiatan secara riil dengan maksud untuk menyerap anggaran kegiatan yang sudah direncanakan. Korupsi (Perbuatan Curang) | ROO.26.36.10.32 | Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan perjalanan dinas dan kurangnya integritas pegawai dalam melaksanakan tugas perjalanan dinas. | C | 1. Terjadinya pemborosan anggaran daerah. 2. Berkurangnya kepercayaan publik terhadap kinerja BAPPERIDA. 3. Akuntabilitas keuangan dan kinerja OPD menurun. 4. Potensi temuan pemeriksaan oleh APIP/BPK. | Pemerintah Daerah, BAPPERIDA dan Masyarakat |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Pelaporan | Risiko Operasional Kegiatan: Keterlambatan dalam pelaporan capaian kinerja secara berkala | - | ROO.26.36.10.33 | Sekretaris BAPPERIDA | Kurangnya optimalnya koordinasi dan mekanisme pelaporan capaian kinerja berkala | C | Hasil evaluasi tidak dapat dilaporkan dengan tepat waktu dan kegiatan tidak dapat dievaluasi secara actual dan faktual | Kepala & Pegawai BAPPERIDA |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Pelaporan | Risiko Kemitraan: Dokumen evaluasi kinerja yang disusun tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku | - | ROO.26.36.10.34 | Sekretaris BAPPERIDA | Kurangnya pemahaman SDM internal terhadap ketentuan penyusunan dokumen | C | Dokumen evaluasi tidak berkualitas dan tidak dapat diterima oleh instansi pengampu yang berdampak pada menurunnya kredibilitas BAPPERIDA | Kepala & Pegawai BAPPERIDA |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Pelaporan | Risiko Fraud: Pertanggungjawaban biaya kegiatan tidak sesuai dengan realisasi di lapangan | PPTK menyusun dokumen pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan, namun dokumen yang diajukan sebagai pertanggung jawaban kegiatan tidak sesuai dengan realisasi kegiatannya atau hanya sebagai formalitas. | ROO.26.36.10.35 | Sekretaris BAPPERIDA | Pengujian pertanggung jawaban baru sebatas pengujian formal/administratif sedangkan pengujian substansi belum dilakukan | C | 1. Terjadinya pemborosan anggaran daerah. 2. Berkurangnya kepercayaan publik terhadap kinerja BAPPERIDA. 3. Akuntabilitas keuangan dan kinerja OPD menurun. 4. Potensi temuan pemeriksaan oleh APIP/BPK. | Pemerintah Daerah, BAPPERIDA dan Masyarakat |

| Kegiatan | Tahap | Uraian Risiko | Skenario Risiko | Kode Risiko | Pemilik | Sebab | C/U C | Dampak | Pihak Terkena |
|---|----------------------|---|---|-----------------|----------------------|---|-------|--|---|
| | | | Korupsi (Perbuatan Curang) | | | | | | |
| Administrasi Perangkat Daerah | Pelaporan | Risiko Operasional: Keterlambatan dalam pelaporan keuangan secara berkala | - | ROO.26.36.10.36 | Sekretaris BAPPERIDA | Adanya kendala sistem yang digunakan dalam proses administrasi keuangan | C | Laporan keuangan tidak disampaikan tepat waktu dan menurunkan tingkat kepatuhan instansi | Kepala & Pegawai BAPPERIDA |
| Administrasi Perangkat Daerah | Pelaporan | Risiko Kemitraan: Laporan keuangan yang disusun tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku | | ROO.26.36.10.37 | Sekretaris BAPPERIDA | Kurangnya pemahaman SDM internal terhadap ketentuan penyusunan laporan keuangan | C | Laporan keuangan tidak berkualitas dan tidak dapat diterima oleh instansi pengampu pada menurunnya kredibilitas BAPPERIDA | Kepala & Pegawai BAPPERIDA |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Pelaporan | Risiko Fraud: Pertanggungjawaban biaya kegiatan tidak sesuai dengan realisasi di lapangan | PPTK menyusun dokumen pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan, namun dokumen yang diajukan sebagai pertanggung jawaban kegiatan tidak sesuai dengan realisasi kegiatannya atau hanya sebagai formalitas. Korupsi (Perbuatan Curang) | ROO.26.36.10.35 | Sekretaris BAPPERIDA | Pengujian pertanggung jawaban baru sebatas pengujian formal/administratif sedangkan pengujian substansi belum dilakukan | C | 1. Terjadinya pemborosan anggaran daerah. 2. Berkurangnya kepercayaan publik terhadap kinerja BAPPERIDA. 3. Akuntabilitas keuangan dan kinerja OPD menurun. 4. Potensi temuan pemeriksaan oleh APIP/BPK. | Pemerintah Daerah, BAPPERIDA dan Masyarakat |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Pelaksanaan Kegiatan | Risiko Operasional Kegiatan: Program pengembangan sumber daya manusia tidak optimal | - | ROO.26.36.10.39 | Sekretaris BAPPERIDA | Peta pengembangan kompetensi pegawai belum disusun secara optimal | C | Menurunnya kualitas SDM aparatur di perangkat daerah | Kepala & Pegawai BAPPERIDA |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Perencanaan | Risiko Kemitraan: Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas kepegawaian tidak sesuai dengan peta pengembangan kompetensi | | ROO.26.36.10.40 | Sekretaris BAPPERIDA | Komunikasi dengan mitra pelaksana kegiatan pengembangan kompetensi pegawai kurang optimal | C | Kompetensi pegawai tidak berkembang dan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah tidak berjalan maksimal | Kepala & Pegawai BAPPERIDA |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Pelaporan | Risiko Fraud: Pertanggungjawaban biaya kegiatan tidak sesuai dengan realisasi di lapangan | PPTK menyusun dokumen pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan, namun dokumen yang diajukan sebagai | ROO.26.36.10.35 | Sekretaris BAPPERIDA | Pengujian pertanggung jawaban baru sebatas pengujian formal/administratif sedangkan pengujian substansi belum dilakukan | C | 1. Terjadinya pemborosan anggaran daerah. 2. Berkurangnya kepercayaan publik terhadap kinerja BAPPERIDA. 3. Akuntabilitas keuangan dan kinerja OPD menurun. | Pemerintah Daerah, BAPPERIDA dan Masyarakat |

| Kegiatan | Tahap | Uraian Risiko | Skenario Risiko | Kode Risiko | Pemilik | Sebab | C/U C | Dampak | Pihak Terkena |
|--|----------------------|---|---|-----------------|----------------------|---|-------|--|---|
| | | | <p>pertanggung jawaban kegiatan tidak sesuai dengan realisasi kegiatannya atau hanya sebagai formalitas.</p> <p>Korupsi (Perbuatan Curang)</p> | | | | | 4. Potensi temuan pemeriksaan oleh APIP/BPK. | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Pelaksanaan Kegiatan | Risiko Operasional Kegiatan: Inefisiensi administrasi umum perangkat daerah | - | ROO.26.36.10.42 | Sekretaris BAPPERIDA | Sistem administrasi yang tidak terorganisir, dan kurang optimalnya penggunaan teknologi informasi | C | Lambatnya proses administratif, potensi kehilangan data, dan kesulitan dalam menjalankan fungsi-fungsi dasar. | Kepala & Pegawai BAPPERIDA A |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Pelaksanaan Kegiatan | Risiko Kemitraan: Pengadaan Barang Habis Pakai tidak sesuai dengan spesifikasi | - | ROO.26.36.10.43 | Sekretaris BAPPERIDA | Spesifikasi permintaan barang tidak jelas | C | Barang yang diadakan tidak dapat digunakan untuk kegiatan administrasi perkantoran | Kepala & Pegawai BAPPERIDA A |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penggunaan Aset | Risiko Fraud: Penggunaan aset dan persediaan BAPPERIDA secara tidak sah untuk kepentingan pribadi pegawai/pejabat BAPPERIDA | <p>a. Pegawai/Pejabat menggunakan bahan habis pakai (ATK, bensin) untuk kepentingan pribadi</p> <p>b. Pengurus barang pengguna membeli ATK tidak sesuai kebutuhan karena saldo barang belum teradministrasi secara rapi</p> <p>c. Pegurus barang pengguna/pegawai menjual barang/ATK yang bernilai mahal</p> <p>d. Pegawai membawa aset lebih dari 1 untuk satu jenis barang</p> <p>Penyalahgunaan Aset (Asset Missappropriation)</p> | ROO.26.36.10.44 | Sekretaris BAPPERIDA | 1. Inventarisasi aset kurang tertib 2. Kurangnya kesadaran dari pemakai aset | C | 1. Kehilangan aset/atk yang menimbulkan pemborosan anggaran. 2. Menurunnya ketersediaan sarana kerja untuk mendukung operasional. 3. Menurunnya akuntabilitas dan kepercayaan terhadap tata kelola aset. | Pegawai BAPPERIDA A dan Masyarakat Penerima Layanan |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan | Pelaksanaan Kegiatan | Risiko Kemitraan: Barang yang diperoleh melalui pengadaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. | - | ROO.26.36.10.45 | Sekretaris BAPPERIDA | Kurangnya klarifikasi dan komunikasi yang jelas terkait spesifikasi barang. | C | Penurunan kualitas pelayanan atau proyek yang menggunakan barang tersebut. Potensi kerugian finansial akibat | Kepala & Pegawai BAPPERIDA A |

| Kegiatan | Tahap | Uraian Risiko | Skenario Risiko | Kode Risiko | Pemilik | Sebab | C/U C | Dampak | Pihak Terkena |
|--|-----------------------------------|---|--|-----------------|----------------------|--|-------|---|---|
| Pemerintah Daerah | | | | | | | | pengadaan ulang atau perbaikan barang. | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pelaksanaan Kegiatan | Risiko Operasional Kegiatan: Barang yang dicari tidak dapat ditemukan pada marketplace | - | ROO.26.36.10.46 | Sekretaris BAPPERIDA | Rekanan yang tersedia tidak menyediakan barang sesuai dengan spesifikasi perencanaan | C | Proses pengadaan BMD tidak dapat dilaksanakan | Kepala & Pegawai BAPPERIDA |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persiapan Pengadaan Barang & Jasa | Risiko Fraud: Anggaran/Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan barang dan jasa ditinggikan (mark up) | PPTK menyusun anggaran PBJ dan/atau HPS tidak dengan keahlian, yaitu tidak melakukan survei harga pasar dan tanpa disertai dengan data pendukung (backup) data harga yang jelas Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) | ROO.26.36.10.47 | Sekretaris BAPPERIDA | 1. Lemahnya peran revidu berjenjang dalam penganggaran pengadaan untuk mencegah kecurangan (fraud) penganggaran PBJ 2. Kurangnya integritas dan intervensi pihak lain untuk kepentingan pribadi/golongan | C | 1. Kerugian keuangan daerah karena pengadaan melebihi harga pasar. 2. Menurunnya efektivitas belanja karena barang/jasa tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. 3. Potensi temuan audit dan menurunnya kepercayaan publik. | Pemerintah Daerah, BAPPERIDA dan Masyarakat |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persiapan Pengadaan Barang & Jasa | Risiko Fraud: PA/KPA dan PPK menerima gratifikasi dari calon rekanan atau rekanan | Calon penyedia memberikan gratifikasi/suap dengan maksud agar dimenangkan atau ditunjuk pada proses PBJ, atau penyedia memberikan gratifikasi/suap sebagai ungkapan rasa terimakasih karena sering ditunjuk/dimenangkan dalam proses PBJ dan berharap selalu ditunjuk Korupsi (Gratifikasi) | ROO.26.36.10.48 | Sekretaris BAPPERIDA | Sosialisasi dan edukasi terhadap pengendalian kecurangan kepada pegawai belum optimal | C | 1. Munculnya praktik KKN dalam proses pengadaan. 2. Kualitas barang/jasa tidak sesuai kebutuhan karena penunjukan penyedia tidak obyektif. 3. Merusak integritas organisasi dan citra BAPPERIDA. | Pemerintah Daerah, BAPPERIDA dan Masyarakat |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pelaksanaan Kegiatan | Risiko Kemitraan: Kurangnya kualitas atau tidak optimalnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | - | ROO.26.36.10.49 | Sekretaris BAPPERIDA | Kurangnya koordinasi antara penyedia jasa dan pemerintah daerah. | C | Ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Penurunan efisiensi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan. | Kepala & Pegawai BAPPERIDA |

| Kegiatan | Tahap | Uraian Risiko | Skenario Risiko | Kode Risiko | Pemilik | Sebab | C/U C | Dampak | Pihak Terkena |
|---|----------------------|---|---|-----------------|----------------------|---|-------|--|---|
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pelaksanaan Kegiatan | Risiko Operasional Kegiatan: Terjadinya kendala dalam penyediaan utilitas penunjang perkantoran | - | ROO.26.36.10.50 | Sekretaris BAPPERIDA | Gangguan layanan penyediaan utilitas dari perusahaan penyedia layanan | C | Kegiatan layanan perkantoran menjadi terhambat | Kepala & Pegawai BAPPERIDA A |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pelaporan | Risiko Fraud: Pertanggungjawaban biaya kegiatan tidak sesuai dengan realisasi di lapangan | PPTK menyusun dokumen pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan, namun dokumen yang diajukan sebagai pertanggung jawaban kegiatan tidak sesuai dengan realisasi kegiatannya atau hanya sebagai formalitas. Korupsi (Perbuatan Curang) | ROO.26.36.10.35 | Sekretaris BAPPERIDA | Pengujian pertanggung jawaban baru sebatas pengujian formal/administratif sedangkan pengujian substansi belum dilakukan | C | 1. Terjadinya pemborosan anggaran daerah. 2. Berkurangnya kepercayaan publik terhadap kinerja BAPPERIDA. 3. Akuntabilitas keuangan dan kinerja OPD menurun. 4. Potensi temuan pemeriksaan oleh APIP/BPK. | Pemerintah Daerah, BAPPERIDA dan Masyarakat |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pelaksanaan Kegiatan | Risiko Operasional Kegiatan: Barang milik daerah tidak dapat digunakan secara maksimal | - | ROO.26.36.10.52 | Sekretaris BAPPERIDA | Masih banyak ditemukan BMD dalam kondisi tidak baik | C | Kegiatan pelayanan perkantoran tidak berjalan dengan baik | Kepala & Pegawai BAPPERIDA A |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pelaksanaan Kegiatan | Risiko Kemitraan: Kerusakan barang milik daerah tidak tertangani | | ROO.26.36.10.51 | Sekretaris BAPPERIDA | Peningkatan biaya pemeliharaan yang tidak terduga dari rekanan | C | Barang milik daerah tidak dapat digunakan secara maksimal | Kepala & Pegawai BAPPERIDA A |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penggunaan Aset | Risiko Fraud: Penyalahgunaan/penggelapan aset milik BAPPERIDA | a. Pejabat/pegawai menyalahgunakan/menggelapkan aset dengan cara tidak mengembalikan aset/barang inventaris yang dipinjamkan b. Pejabat/pegawai secara tidak bertanggung jawab menjual/menguasai | ROO.26.36.10.53 | Sekretaris BAPPERIDA | Inventarisasi aset yang kurang tertib | C | 1. Kehilangan aset dan potensi kerugian keuangan daerah. 2. Hambatan operasional akibat berkurangnya sarana/prasarana kerja. 3. Potensi sanksi hukum dan temuan audit. | Pemerintah Daerah dan BAPPERIDA A |

| Kegiatan | Tahap | Uraian Risiko | Skenario Risiko | Kode Risiko | Pemilik | Sebab | C/U C | Dampak | Pihak Terkena |
|--|----------------------|--|---|-----------------|---------------------------------|--|-------|--|---|
| | | | aset BAPPERIDA c. Tim Pengurus barang pengguna menghapus aset BAPPERIDA tidak sesuai dengan ketentuan untuk menghilangkan aset yang dicuri/hilang d. PPTK memalsukan jenis/merek aset untuk mendapatkan keuntungan Penyalahgunaan Aset (Asset Missappropriation) | | | | | | |
| Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan | Pelaporan | Risiko Operasional Kegiatan: Hasil penelitian tidak diakomodir sebagai dasar perumusan kebijakan | - | ROO.26.36.10.54 | Kepala Bidang Riset dan Inovasi | Resistensi terhadap perubahan, kurangnya pemahaman terkait implikasi hasil penelitian, atau kebijakan yang kaku | C | Inovasi kebijakan tidak dapat diimplementasikan | Pemerintah Daerah & Masyarakat |
| Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan | Pelaksanaan Kegiatan | Risiko Kemitraan: Kerjasama penelitian bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan tidak dapat dilaksanakan | - | ROO.26.36.10.55 | Kepala Bidang Riset dan Inovasi | Tidak tersedianya SDM peneliti dengan keahlian yang dibutuhkan | C | Rekomendasi kebijakan terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan tidak dapat dirumuskan | Pemerintah Daerah & Masyarakat |
| Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan | Pelaksanaan Kegiatan | Risiko Fraud: Kegiatan perjalanan dinas tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan | Pejabat/pegawai melaporkan kegiatan perjalanan dinas namun tidak terdapat pelaksanaan kegiatan secara riil dengan maksud untuk menyerap anggaran kegiatan yang sudah direncanakan. Korupsi (Perbuatan Curang) | ROO.26.36.10.56 | Kepala Bidang Riset dan Inovasi | Kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan perjalanan dinas dan kurangnya integritas pegawai dalam melaksanakan tugas perjalanan dinas. | C | 1. Terjadinya pemborosan anggaran daerah. 2. Berkurangnya kepercayaan publik terhadap kinerja BAPPERIDA. 3. Akuntabilitas keuangan dan kinerja OPD menurun. 4. Potensi temuan pemeriksaan oleh APIP/BPK. | Pemerintah Daerah, BAPPERIDA dan Masyarakat |

| Kegiatan | Tahap | Uraian Risiko | Skenario Risiko | Kode Risiko | Pemilik | Sebab | C/U C | Dampak | Pihak Terkena |
|--|--------------------------|---|--|-----------------|---------------------------------|---|-------|--|---|
| Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | Pelaporan | Risiko Kebijakan: Hasil penelitian tidak diakomodir sebagai dasar perumusan kebijakan di bidang sosial dan kependudukan | - | ROO.26.36.10.57 | Kepala Bidang Riset dan Inovasi | Riset tidak didasarkan pada isu-isu terkini di bidang pembangunan sosial dan kependudukan. | C | Riset yang tidak relevan atau tidak dapat menjawab tantangan pembangunan social yang aktual. | Pemerintah Daerah & Masyarakat |
| Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | Pelaksanaan Kegiatan | Risiko Kemitraan: Kerjasama penelitian bidang sosial dan kependudukan tidak dapat dilaksanakan | | ROO.26.36.10.58 | Kepala Bidang Riset dan Inovasi | Tidak tersedianya SDM peneliti dengan keahlian yang dibutuhkan | C | Rekomendasi kebijakan terkait sosial dan kependudukan tidak dapat dirumuskan | Pemerintah Daerah & Masyarakat |
| Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | Perencanaan Penganggaran | Risiko Fraud: Risiko pemecahan anggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa | PPTK sengaja menyusun paket pekerjaan untuk pengadaan barang dan jasa dengan memecah nilai pengadaan di bawah Rp 200 Juta yang bertujuan untuk menghindari tender atau dilakukan dengan mekanisme pengadaan langsung Korupsi (Perbuatan Curang) | ROO.26.36.10.59 | Kepala Bidang Riset dan Inovasi | Kurangnya integritas PPTK sehingga sengaja melakukan paket pekerjaan dengan niat untuk menghindari lelang | C | 1. Tidak efisiennya penggunaan anggaran. 2. Potensi pelanggaran aturan pengadaan dan temuan audit. 3. Hilangnya kepercayaan publik terhadap proses pengadaan yang transparan. | Pemerintah Daerah, BAPPERIDA dan Masyarakat |
| Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Pelaporan | Risiko Kebijakan: Hasil penelitian tidak diakomodir sebagai dasar perumusan kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan | - | ROO.26.36.10.60 | Kepala Bidang Riset dan Inovasi | Riset tidak didasarkan pada isu-isu terkini di bidang pembangunan ekonomi. | C | Riset yang tidak relevan atau tidak dapat menjawab tantangan pembangunan ekonomi yang aktual. | Pemerintah Daerah & Masyarakat |
| Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Pelaksanaan Kegiatan | Risiko Kemitraan: Kerjasama penelitian bidang ekonomi dan pembangunan tidak dapat dilaksanakan | | ROO.26.36.10.61 | Kepala Bidang Riset dan Inovasi | Tidak tersedianya SDM peneliti dengan keahlian yang dibutuhkan | C | Rekomendasi kebijakan terkait ekonomi dan pembangunan tidak dapat dirumuskan | Pemerintah Daerah & Masyarakat |
| Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Pelaporan | Risiko Fraud: Pengeluaran kegiatan fiktif | PPTK melakukan pertanggungjawaban belanja barang dan jasa tidak sesuai dengan realisasi untuk kepentingan pribadi/golongan Korupsi (Perbuatan Curang) | ROO.26.36.10.62 | Kepala Bidang Riset dan Inovasi | Kurangnya integritas dan intervensi pihak lain untuk kepentingan pribadi/golongan | C | 1. Kerugian keuangan daerah karena anggaran terserap tanpa kegiatan nyata. 2. Berkurangnya dana yang seharusnya digunakan untuk program prioritas. 3. Menurunnya kredibilitas lembaga akibat potensi temuan hukum/audit. | Pemerintah Daerah dan BAPPERIDA |

| Kegiatan | Tahap | Uraian Risiko | Skenario Risiko | Kode Risiko | Pemilik | Sebab | C/U C | Dampak | Pihak Terkena |
|---|----------------------|--|---|-----------------|---------------------------------|--|-------|---|---|
| Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Pelaksanaan Kegiatan | Risiko Kebijakan: Inovasi yang dikembangkan tidak dapat diimplementasikan secara berkelanjutan | - | ROO.26.36.10.63 | Kepala Bidang Riset dan Inovasi | Kurangnya dukungan sumber daya dan komitmen pimpinan dalam implementasi inovasi | C | Terhambatnya adopsi teknologi modern, kesulitan dalam meningkatkan efisiensi, dan kurangnya daya saing dalam menghadapi tantangan global. | Pemerintah Daerah & Masyarakat |
| Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Pelaksanaan Kegiatan | Risiko Kemitraan: Inovasi yang dilaksanakan oleh unit pelayanan publik tidak memenuhi kriteria kematangan inovasi | - | ROO.26.36.10.64 | Kepala Bidang Riset dan Inovasi | Kurangnya pemberian pemahaman kepada SDM inovator terkait pentingnya legitimasi inovasi | C | Keberlanjutan dan legitimasi inovasi sulit dicapai | Pemerintah Daerah & Masyarakat |
| Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Pelaporan | Risiko Fraud: Pertanggungjawaban biaya kegiatan tidak sesuai dengan realisasi di lapangan | PPTK menyusun dokumen pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan, namun dokumen yang diajukan sebagai pertanggung jawaban kegiatan tidak sesuai dengan realisasi kegiatannya atau hanya sebagai formalitas. Korupsi (Perbuatan Curang) | ROO.26.36.10.65 | Kepala Bidang Riset dan Inovasi | Pengujian pertanggung jawaban baru sebatas pengujian formal/administratif sedangkan pengujian substansi belum dilakukan | C | 1. Laporan keuangan tidak akurat dan berpotensi menimbulkan temuan audit. 2. Risiko sanksi administrasi dan hukum. 3. Menurunnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran. | Pemerintah Daerah dan BAPPERIDA |
| Penelitian Pengembangan, Pengkajian Dan Penerapan | Pelaksanaan Kegiatan | Risiko Operasional Kegiatan: Kegiatan kelitbangan yang difasilitasi tidak sesuai dengan arah kebijakan kelitbangan | - | ROO.26.36.10.66 | Kepala Bidang Riset dan Inovasi | Kurangnya komunikasi kepada mitra penelitian | C | Kegiatan penelitian dan pengembangan tidak memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan daerah | Pemerintah Daerah & Masyarakat |
| Penelitian Pengembangan, Pengkajian Dan Penerapan | Pelaksanaan Kegiatan | Risiko Kemitraan: Rekomendasi kegiatan penelitian dan pengembangan tidak dapat diterbitkan | - | ROO.26.36.10.67 | Kepala Bidang Riset dan Inovasi | Dokumen pengajuan rekomendasi penelitian tidak memenuhi persyaratan | C | Kegiatan kelitbangan yang dilakukan oleh mitra tidak dapat dilaksanakan | Pemerintah Daerah & Masyarakat |
| Penelitian Pengembangan, Pengkajian Dan Penerapan | Pelaporan | Risiko Fraud: Kegiatan perjalanan dinas tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan | Pejabat/pegawai melaporkan kegiatan perjalanan dinas namun tidak terdapat pelaksanaan kegiatan secara riil dengan maksud untuk menyerap anggaran kegiatan | ROO.26.36.10.56 | Kepala Bidang Riset dan Inovasi | Kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan perjalanan dinas dan kurangnya integritas pegawai dalam melaksanakan tugas perjalanan dinas. | C | 1. Terjadinya pemborosan anggaran daerah. 2. Berkurangnya kepercayaan publik terhadap kinerja BAPPERIDA. 3. Akuntabilitas keuangan dan kinerja OPD menurun. 4. Potensi temuan | Pemerintah Daerah, BAPPERIDA dan Masyarakat |

| Kegiatan | Tahap | Uraian Risiko | Skenario Risiko | Kode Risiko | Pemilik | Sebab | C/U C | Dampak | Pihak Terkena |
|---------------------|----------------------|---|--|-----------------|---------------------------------|--|-------|--|---|
| | | | yang sudah direncanakan. Korupsi (Perbuatan Curang) | | | | | pemeriksaan oleh APIP/BPK. | |
| Invensi dan Inovasi | Pelaksanaan Kegiatan | Risiko Operasional Kegiatan: Pengembangan inovasi yang difasilitasi tidak mendapatkan legitimasi | - | ROO.26.36.10.69 | Kepala Bidang Riset dan Inovasi | Kelengkapan atas pendaftaran HKI/legitimasi lainnya tidak terpenuhi | C | Inovasi tidak mendapatkan pengakuan dan keberlanjutan inovasi terhambat | Pemerintah Daerah & Masyarakat |
| Invensi dan Inovasi | Pelaksanaan Kegiatan | Risiko Kemitraan: Inovasi yang dikembangkan oleh mitra tidak diimplementasikan secara berkelanjutan | | ROO.26.36.10.70 | Kepala Bidang Riset dan Inovasi | Keterbatasan sumber daya anggaran bagi inovator mitra | C | Munculnya lagi permasalahan akibat inovasi yang tidak berjalan | Pemerintah Daerah & Masyarakat |
| Invensi dan Inovasi | Pelaporan | Risiko Fraud: Kegiatan perjalanan dinas tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan | Pejabat/pegawai melaporkan kegiatan perjalanan dinas namun tidak terdapat pelaksanaan kegiatan secara riil dengan maksud untuk menyerap anggaran kegiatan yang sudah direncanakan. Korupsi (Perbuatan Curang) | ROO.26.36.10.56 | Kepala Bidang Riset dan Inovasi | Kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan perjalanan dinas dan kurangnya integritas pegawai dalam melaksanakan tugas perjalanan dinas. | C | 1. Terjadinya pemborosan anggaran daerah. 2. Berkurangnya kepercayaan publik terhadap kinerja BAPPERIDA. 3. Akuntabilitas keuangan dan kinerja OPD menurun. 4. Potensi temuan pemeriksaan oleh APIP/BPK. | Pemerintah Daerah, BAPPERIDA dan Masyarakat |

C. Hasil Analisis Risiko

Skala Risiko

| Skala Nilai Risiko | Kategori | Penerimaan Risiko | Tindakan |
|--------------------|---------------|---|---|
| 1,00 – 2,00 | Sangat Rendah | Dapat diterima | Tidak diperlukan tindakan |
| 2,01 – 4,00 | Rendah | Dapat diterima | Tidak diperlukan tindakan |
| 4,01 – 9,00 | Sedang | Diperlukan pengendalian yang lebih baik | Disarankan diambil tindakan jika tersedia sumber daya |
| 9,01 – 12,00 | Tinggi | Harus menjadi perhatian manajemen | Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko |
| 12,01 – 25,00 | Sangat Tinggi | Tidak dapat diterima | Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko |

Hasil Analisis Risiko

Berdasarkan hasil diskusi dan pemetaan yang dilakukan pada BAPPERIDA Kabupaten Lamongan, maka diperoleh peta penilaian risiko sebagai berikut:

| Uraian Risiko | Kode Risiko | Skala Dampak | Skala Kemungkinan | Skala Risiko | Kategori |
|---|-----------------|--------------|-------------------|--------------|----------|
| Monitoring kinerja pembangunan pemerintah daerah tidak berjalan optimal | RSO.26.36.10.01 | 4 | 2 | 8 | Sedang |
| Ketidak konsistenan antara dokumen perencanaan dengan penganggaran pemerintah daerah | RSO.26.36.10.02 | 3 | 3 | 9 | Tinggi |
| Program prioritas pemerintah daerah tidak dapat dilaksanakan | RSO.26.36.10.03 | 4 | 2 | 8 | Sedang |
| Ketidakselarasan dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perangkat daerah | RSO.26.36.10.04 | 3 | 3 | 9 | Tinggi |
| Fungsi pelayanan BAPPERIDA tidak berjalan dengan optimal | RSO.26.36.10.05 | 4 | 2 | 8 | Sedang |
| Manajemen internal perangkat daerah tidak efisien | RSO.26.36.10.06 | 4 | 2 | 8 | Sedang |
| Identifikasi risiko dan kegiatan pengendalian perangkat daerah tidak dapat dilaksanakan | RSO.26.36.10.07 | 4 | 2 | 8 | Sedang |
| Rekomendasi kebijakan hasil penelitian tidak berkualitas | RSO.26.36.10.08 | 3 | 3 | 9 | Tinggi |
| Inovasi yang dikembangkan unit pelayanan publik/perangkat daerah tidak mendapatkan legitimasi dan tidak berkelanjutan | RSO.26.36.10.09 | 4 | 2 | 8 | Sedang |
| Risiko Operasional Kegiatan: Ketidaksesuaian antara perencanaan dan pendanaan | ROO.26.36.10.01 | 4 | 2 | 8 | Sedang |
| Risiko Kemitraan: Kurangnya partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan | ROO.26.36.10.02 | 4 | 2 | 8 | Sedang |
| Risiko Operasional Kegiatan: Tidak terakomodirnya usulan masyarakat dalam dokumen perencanaan | ROO.26.36.10.03 | 4 | 2 | 8 | Sedang |

| Uraian Risiko | Kode Risiko | Skala Dampak | Skala Kemungkinan | Skala Risiko | Kategori |
|--|-----------------|--------------|-------------------|--------------|----------|
| Risiko Kemitraan: Kegiatan hibah dan bantuan tidak diketahui kelayakan dan ketepatan sasaran | ROO.26.36.10.04 | 4 | 2 | 8 | Sedang |
| Risiko Fraud: Risiko pemecahan anggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa | ROO.26.36.10.05 | 4 | 2 | 8 | Sedang |
| Risiko Operasional Kegiatan: Kurangnya kualitas analisis data | ROO.26.36.10.06 | 3 | 2 | 6 | Sedang |
| Risiko Kemitraan: Data yang dihasilkan oleh produsen data kurang berkualitas | ROO.26.36.10.07 | 3 | 2 | 6 | Sedang |
| Risiko Fraud: Pengeluaran kegiatan fiktif | ROO.26.36.10.08 | 4 | 2 | 8 | Sedang |
| Risiko Operasional Kegiatan: Kurangnya sistem pengendalian dan evaluasi | ROO.26.36.10.09 | 3 | 2 | 6 | Sedang |
| Risiko Kemitraan: Pelaporan evaluasi pembangunan tidak tepat waktu | ROO.26.36.10.10 | 3 | 2 | 6 | Sedang |
| Risiko Fraud: Pertanggungjawaban biaya kegiatan tidak sesuai dengan realisasi di lapangan | ROO.26.36.10.11 | 4 | 2 | 8 | Sedang |
| Risiko Operasional Kegiatan: Sistem Informasi Pemerintah Daerah tidak dapat digunakan secara maksimal | ROO.26.36.10.12 | 3 | 2 | 6 | Sedang |
| Risiko Kemitraan: Mitra Perencanaan Pembangunan mengalami kendala dalam melakukan usulan melalui SIPD | ROO.26.36.10.13 | 3 | 2 | 6 | Sedang |
| Risiko Fraud: Kegiatan perjalanan dinas tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan | ROO.26.36.10.14 | 4 | 2 | 8 | Sedang |
| Risiko Operasional Kegiatan: Program prioritas bidang pemerintahan dan pembangunan manusia tidak terakomodir dalam dokumen perencanaan | ROO.26.36.10.15 | 4 | 2 | 8 | Sedang |
| Risiko Kemitraan: Dokumen perencanaan perangkat daerah tidak sesuai dengan ketentuan | ROO.26.36.10.16 | 3 | 2 | 6 | Sedang |
| Risiko Fraud: Risiko pemecahan anggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa | ROO.26.36.10.17 | 4 | 2 | 8 | Sedang |
| Risiko Fraud: Pengeluaran kegiatan fiktif | ROO.26.36.10.18 | 4 | 2 | 8 | Sedang |
| Risiko Fraud: Pertanggungjawaban biaya kegiatan tidak sesuai dengan realisasi di lapangan | ROO.26.36.10.19 | 4 | 2 | 8 | Sedang |
| Risiko Fraud: Kegiatan perjalanan dinas tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan | ROO.26.36.10.20 | 4 | 2 | 8 | Sedang |
| Risiko Operasional Kegiatan: Program prioritas bidang pemerintahan dan pembangunan manusia tidak terakomodir dalam dokumen perencanaan | ROO.26.36.10.21 | 4 | 2 | 8 | Sedang |
| Risiko Kemitraan: Dokumen perencanaan perangkat daerah tidak sesuai dengan ketentuan | ROO.26.36.10.22 | 3 | 2 | 6 | Sedang |
| Risiko Fraud: Risiko pemecahan anggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa | ROO.26.36.10.23 | 4 | 2 | 8 | Sedang |
| Risiko Fraud: Pengeluaran kegiatan fiktif | ROO.26.36.10.24 | 4 | 2 | 8 | Sedang |

| Uraian Risiko | Kode Risiko | Skala Dampak | Skala Kemungkinan | Skala Risiko | Kategori |
|--|-----------------|--------------|-------------------|--------------|----------|
| Risiko Fraud: Pertanggungjawaban biaya kegiatan tidak sesuai dengan realisasi di lapangan | ROO.26.36.10.25 | 4 | 2 | 8 | Sedang |
| Risiko Fraud: Kegiatan perjalanan dinas tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan | ROO.26.36.10.26 | 4 | 2 | 8 | Sedang |
| Risiko Operasional Kegiatan: Program prioritas bidang pemerintahan dan pembangunan manusia tidak terakomodir dalam dokumen perencanaan | ROO.26.36.10.27 | 4 | 2 | 8 | Sedang |
| Risiko Kemitraan: Dokumen perencanaan perangkat daerah tidak sesuai dengan ketentuan | ROO.26.36.10.28 | 3 | 2 | 6 | Sedang |
| Risiko Fraud: Risiko pemecahan anggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa | ROO.26.36.10.29 | 4 | 2 | 8 | Sedang |
| Risiko Fraud: Pengeluaran kegiatan fiktif | ROO.26.36.10.30 | 4 | 2 | 8 | Sedang |
| Risiko Fraud: Pertanggungjawaban biaya kegiatan tidak sesuai dengan realisasi di lapangan | ROO.26.36.10.31 | 4 | 2 | 8 | Sedang |
| Risiko Fraud: Kegiatan perjalanan dinas tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan | ROO.26.36.10.32 | 4 | 2 | 8 | Sedang |
| Risiko Operasional Kegiatan: Keterlambatan dalam pelaporan capaian kinerja secara berkala | ROO.26.36.10.33 | 3 | 1 | 3 | Rendah |
| Risiko Kemitraan: Dokumen evaluasi kinerja yang disusun tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku | ROO.26.36.10.34 | 3 | 1 | 3 | Rendah |
| Risiko Fraud: Pertanggungjawaban biaya kegiatan tidak sesuai dengan realisasi di lapangan | ROO.26.36.10.35 | 4 | 2 | 8 | Sedang |
| Risiko Operasional: Keterlambatan dalam pelaporan keuangan secara berkala | ROO.26.36.10.36 | 3 | 1 | 3 | Rendah |
| Risiko Kemitraan: Laporan keuangan yang disusun tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku | ROO.26.36.10.37 | 3 | 1 | 3 | Rendah |
| Risiko Fraud: Pertanggungjawaban biaya kegiatan tidak sesuai dengan realisasi di lapangan | ROO.26.36.10.35 | 4 | 2 | 8 | Sedang |
| Risiko Operasional Kegiatan: Program pengembangan sumber daya manusia tidak optimal | ROO.26.36.10.39 | 4 | 2 | 8 | Sedang |
| Risiko Kemitraan: Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas kepegawaian tidak sesuai dengan peta pengembangan kompetensi | ROO.26.36.10.40 | 4 | 2 | 8 | Sedang |
| Risiko Fraud: Pertanggungjawaban biaya kegiatan tidak sesuai dengan realisasi di lapangan | ROO.26.36.10.35 | 4 | 2 | 8 | Sedang |
| Risiko Operasional Kegiatan: Inefisiensi administrasi umum perangkat daerah | ROO.26.36.10.42 | 3 | 2 | 6 | Sedang |
| Risiko Kemitraan: Pengadaan Barang Habis Pakai tidak sesuai dengan spesifikasi | ROO.26.36.10.43 | 3 | 1 | 3 | Rendah |

| Uraian Risiko | Kode Risiko | Skala Dampak | Skala Kemungkinan | Skala Risiko | Kategori |
|--|-----------------|--------------|-------------------|--------------|----------|
| Risiko Fraud: Penggunaan aset dan persediaan BAPPERIDA secara tidak sah untuk kepentingan pribadi pegawai/pejabat BAPPERIDA | ROO.26.36.10.44 | 3 | 2 | 6 | Sedang |
| Risiko Kemitraan: Barang yang diperoleh melalui pengadaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. | ROO.26.36.10.45 | 4 | 1 | 4 | Sedang |
| Risiko Operasional Kegiatan: Barang yang dicari tidak dapat ditemukan pada marketplace | ROO.26.36.10.46 | 3 | 1 | 3 | Rendah |
| Risiko Fraud: Anggaran/Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan barang dan jasa ditinggikan (mark up) | ROO.26.36.10.47 | 3 | 2 | 6 | Sedang |
| Risiko Fraud: PA/KPA dan PPK menerima gratifikasi dari calon rekanan atau rekanan | ROO.26.36.10.48 | 4 | 2 | 8 | Sedang |
| Risiko Kemitraan: Kurangnya kualitas atau tidak optimalnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | ROO.26.36.10.49 | 4 | 2 | 8 | Sedang |
| Risiko Operasional Kegiatan: Terjadinya kendala dalam penyediaan utilitas penunjang perkantoran | ROO.26.36.10.50 | 4 | 1 | 4 | Sedang |
| Risiko Fraud: Pertanggungjawaban biaya kegiatan tidak sesuai dengan realisasi di lapangan | ROO.26.36.10.35 | 4 | 2 | 8 | Sedang |
| Risiko Operasional Kegiatan: Barang milik daerah tidak dapat digunakan secara maksimal | ROO.26.36.10.52 | 4 | 2 | 8 | Sedang |
| Risiko Kemitraan: Kerusakan barang milik daerah tidak tertangani | ROO.26.36.10.51 | 3 | 1 | 3 | Rendah |
| Risiko Fraud: Penyalahgunaan/penggelapan aset milik BAPPERIDA | ROO.26.36.10.53 | 3 | 2 | 6 | Sedang |
| Risiko Operasional Kegiatan: Hasil penelitian tidak diakomodir sebagai dasar perumusan kebijakan | ROO.26.36.10.54 | 3 | 2 | 6 | Sedang |
| Risiko Kemitraan: Kerjasama penelitian bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan tidak dapat dilaksanakan | ROO.26.36.10.55 | 3 | 1 | 3 | Rendah |
| Risiko Fraud: Kegiatan perjalanan dinas tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan | ROO.26.36.10.56 | 4 | 2 | 8 | Sedang |
| Risiko Kebijakan: Hasil penelitian tidak diakomodir sebagai dasar perumusan kebijakan di bidang sosial dan kependudukan | ROO.26.36.10.57 | 3 | 2 | 6 | Sedang |
| Risiko Kemitraan: Kerjasama penelitian bidang sosial dan kependudukan tidak dapat dilaksanakan | ROO.26.36.10.58 | 3 | 1 | 3 | Rendah |
| Risiko Fraud: Risiko pemecahan anggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa | ROO.26.36.10.59 | 4 | 2 | 8 | Sedang |
| Risiko Kebijakan: Hasil penelitian tidak diakomodir sebagai dasar perumusan kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan | ROO.26.36.10.60 | 3 | 2 | 6 | Sedang |

| Uraian Risiko | Kode Risiko | Skala Dampak | Skala Kemungkinan | Skala Risiko | Kategori |
|--|-----------------|--------------|-------------------|--------------|----------|
| Risiko Kemitraan: Kerjasama penelitian bidang ekonomi dan pembangunan tidak dapat dilaksanakan | ROO.26.36.10.61 | 3 | 1 | 3 | Rendah |
| Risiko Fraud: Pengeluaran kegiatan fiktif | ROO.26.36.10.62 | 4 | 2 | 8 | Sedang |
| Risiko Kebijakan: Inovasi yang dikembangkan tidak dapat diimplementasikan secara berkelanjutan | ROO.26.36.10.63 | 3 | 2 | 6 | Sedang |
| Risiko Kemitraan: Inovasi yang dilaksanakan oleh unit pelayanan publik tidak memenuhi kriteria kematangan inovasi | ROO.26.36.10.64 | 3 | 2 | 6 | Sedang |
| Risiko Fraud: Pertanggungjawaban biaya kegiatan tidak sesuai dengan realisasi di lapangan | ROO.26.36.10.65 | 4 | 2 | 8 | Sedang |
| Risiko Operasional Kegiatan: Kegiatan kelitbangan yang difasilitasi tidak sesuai dengan arah kebijakan kelitbangan | ROO.26.36.10.66 | 4 | 1 | 4 | Sedang |
| Risiko Kemitraan: Rekomendasi kegiatan penelitian dan pengembangan tidak dapat diterbitkan | ROO.26.36.10.67 | 3 | 2 | 6 | Sedang |
| Risiko Fraud: Kegiatan perjalanan dinas tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan | ROO.26.36.10.56 | 4 | 2 | 8 | Sedang |
| Risiko Operasional Kegiatan: Pengembangan inovasi yang difasilitasi tidak mendapatkan legitimasi | ROO.26.36.10.69 | 3 | 2 | 6 | Sedang |
| Risiko Kemitraan: Inovasi yang dikembangkan oleh mitra tidak diimplementasikan secara berkelanjutan | ROO.26.36.10.70 | 3 | 2 | 6 | Sedang |
| Risiko Fraud: Kegiatan perjalanan dinas tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan | ROO.26.36.10.56 | 4 | 2 | 8 | Sedang |

D. Rencana Tindak Pengendalian

Berdasarkan uraian risiko yang telah dipaparkan, terdapat beberapa pengendalian yang sudah dilakukan, celah pengendalian dan pengendalian yang masih dibutuhkan. Berikut ini daftar uraian rencana tindak pengendalian atas risiko di lingkup BAPPERIDA Kabupaten Lamongan:

Risiko Strategis OPD Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah:

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Pengendalian yang Sudah Ada | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/PJ | Target Waktu |
|----|--|-----------------|--|---|--|---|--------------|
| 1 | Monitoring kinerja pembangunan pemerintah daerah tidak berjalan optimal | RSO.26.36.10.01 | Pemanfaatan aplikasi SIMELA sebagai sistem evaluasi capaian kinerja | Aplikasi masih sering mengalami gangguan dan kurang terintegrasi | Melakukan koordinasi dengan Dinas Kominfo dan integrasi sistem secara terpusat dengan data-data capaian kinerja dan keuangan pemerintah daerah | Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi | Juli 2026 |
| 2 | Ketidak konsistenan antara dokumen perencanaan dengan penganggaran pemerintah daerah | RSO.26.36.10.02 | Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) | Kurang optimalnya koordinasi antar pihak dalam TAPD | Meningkatkan fungsi koordinasi TAPD, khususnya pada fase KUA-PPAS dan RAPBD | Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi | Oktober 2026 |
| 3 | Program prioritas pemerintah daerah tidak dapat dilaksanakan | RSO.26.36.10.03 | Asistensi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Kurangnya komitmen PD dalam merencanakan program prioritas | Melakukan asistensi dan verifikasi penyusunan dokumen perencanaan beserta penandatanganan Berita Acara penyusunan dokumen Renja | Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Kepala Bidang Perekonomian dan SDA, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Juli 2026 |
| 4 | Ketidakselarasan dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perangkat daerah | RSO.26.36.10.04 | Asistensi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Kurang optimalnya pendampingan mitra dalam penyusunan dokumen perencanaan | Meningkatkan fungsi koordinasi dan pendampingan dalam penyusunan dan penginputan SIPD | Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Kepala Bidang Perekonomian dan SDA, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Juli 2026 |
| 5 | Fungsi pelayanan BAPPERIDA tidak berjalan dengan optimal | RSO.26.36.10.05 | Peningkatan kapasitas SDM melalui kegiatan webinar/workshop | Kegiatan secara mandiri dan tidak terkordinir | Melaksanakan bimbingan teknis bagi SDM perangkat daerah | Sekretaris | Juli 2026 |
| 6 | Manajemen internal perangkat daerah tidak efisien | RSO.26.36.10.06 | Implementasi SAKIP dan pemanfaatan sistem aplikasi (SIMELA, ESR, SIMARIO) dalam manajemen internal | Aplikasi belum terintegrasi dan masih sering mengalami kendala | Koordinasi dengan Tim SAKIP Kabupaten dalam pendampingan implementasi SAKIP | Sekretaris | Oktober 2026 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Pengendalian yang Sudah Ada | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/PJ | Target Waktu |
|----|---|-----------------|--|--|---|---------------------------------|------------------------|
| 7 | Identifikasi risiko dan kegiatan pengendalian perangkat daerah tidak dapat dilaksanakan | RSO.26.36.10.07 | Pemanfaatan aplikasi SIMARIO dan pendampingan oleh tim MR Kabupaten | Aplikasi masih terbatas dan sering mengalami kendala | Koordinasi dengan Tim MRI Kabupaten dalam pendampingan implementasi MRI | Sekretaris | Oktober 2026 |
| 8 | Rekomendasi kebijakan hasil penelitian tidak berkualitas | RSO.26.36.10.08 | Rencana Induk dan Peta Jalan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Daerah (RIPJ PID) | Adanya perubahan tren dan permasalahan terkini | Melakukan FGD penentuan isu dan topik penelitian dengan stakeholders pembangunan daerah | Kepala Bidang Riset dan Inovasi | Juli 2026 |
| 9 | Inovasi yang dikembangkan unit pelayanan publik/perangkat daerah tidak mendapatkan legitimasi dan tidak berkelanjutan | RSO.26.36.10.09 | Sistem Informasi Riset dan Inovasi Daerah | Kurangnya dukungan komitmen dari pejabat/pimpinan | Meningkatkan sosialisasi dan pendampingan kepada inovator dan unit pelayanan publik/perangkat daerah dalam proses implementasi inovasi di instansinya | Kepala Bidang Riset dan Inovasi | 2026-11-01 00:00:00 |

Risiko Operasional OPD Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah:

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Pengendalian yang Sudah Ada | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/PJ | Target Waktu |
|----|---|-----------------|---|--|---|--|---------------|
| 1 | Risiko Operasional Kegiatan: Ketidaksiharian antara perencanaan dan pendanaan | ROO.26.36.10.01 | Koordinasi antara tim perencanaan dan keuangan (TAPD) | Sering terjadinya perubahan kebijakan yang mendadak | Meningkatkan koordinasi antara tim perencanaan dan keuangan, menyusun rencana untuk perubahan kebijakan atau anggaran, dan melakukan perubahan perencanaan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi. | Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi | Desember 2026 |
| 2 | Risiko Kemitraan: Kurangnya partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan | ROO.26.36.10.02 | Sosialisasi program prioritas pembangunan daerah | Sosialisasi yang dilakukan belum mencakup semua kalangan | Melakukan koordinasi dengan Dinas Kominfo untuk mempublikasikan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD, PRKPD, RPJMD) | Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi | Juli 2026 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Pengendalian yang Sudah Ada | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/PJ | Target Waktu |
|----|---|-----------------|--|---|---|--|---------------|
| 3 | Risiko Operasional Kegiatan: Tidak terakomodirnya usulan masyarakat dalam dokumen perencanaan | ROO.26.36.10.03 | Pemanfaatan SIPD dan menyusun Kamus Usulan | Sosialisasi pemanfaatan SIPD dan kamus usulan belum optimal | Melakukan intensifikasi pemanfaatan SIPD pada tahap perencanaan untuk usulan program pembangunan dan sosialisasi kamus usulan untuk program pembangunan kepada masyarakat maupun anggota DPRD (Pokir) | Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi | Juli 2026 |
| 4 | Risiko Kemitraan: Kegiatan hibah dan bantuan tidak diketahui kelayakan dan ketepatan sasaran | ROO.26.36.10.04 | Koordinasi dengan DPRD dan OPD terkait usulan program hibah dan bantuan keuangan | Masih ditemukan usulan yang tidak dilampiri dengan proposal atau proposal tidak sesuai. | Penerapan SOP usulan program bantuan sosial dan bantuan keuangan disertai dengan proposal secara ketat dengan melakukan verifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. | Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi | Juli 2026 |
| 5 | Risiko Fraud: Risiko pemecahan anggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa | ROO.26.36.10.05 | Perbup Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan | Sosialisasi pencegahan kecurangan dan edukasi kepada perencana/pengguna anggaran masih kurang. | 1. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi pencegahan kecurangan kepada pegawai yang terkait dengan perencanaan pengadaan barang dan jasa 2. Pakta integritas para pelaku pengadaan | Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi | Desember 2026 |
| 6 | Risiko Operasional Kegiatan: Kurangnya kualitas analisis data | ROO.26.36.10.06 | Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Lamongan | Kurang intensnya forum dalam memberikan pemahaman terkait pengelolaan data | Mendorong SDM untuk mengikuti peningkatan kapasitas terkait pengelolaan data, melalui webinar, workshop, dll. | Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi | Desember 2026 |
| 7 | Risiko Kemitraan: Data yang dihasilkan oleh produsen data kurang berkualitas | ROO.26.36.10.07 | Penerbitan Rekomendasi Statistik oleh BPS | Belum semua produsen data menyadari (aware) terhadap peraturan terkait izin Rekomendasi Statistik | Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi kepada Perangkat Daerah untuk mengajukan Rekomendasi Statistik pada setiap kegiatan pengumpulan data yang dilakukan | Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi | Desember 2026 |
| 8 | Risiko Fraud: Pengeluaran kegiatan fiktif | ROO.26.36.10.08 | Perbup Nomor 87 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur | Monitoring ketepatan waktu penyusunan laporan dan dokumen | 1. Monitoring ketepatan waktu penyusunan dan pengiriman dokumen SPJ fisik 2. Optimalisasi peran Pejabat | Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi | Desember 2026 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Pengendalian yang Sudah Ada | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/PJ | Target Waktu |
|----|--|-----------------|---|--|---|--|---------------|
| | | | Perbendaharaan Keuangan Daerah | pendukung kegiatan belum ketat. | Penatausahaan Keuangan dalam melakukan proses verifikasi SPJ | | |
| 9 | Risiko Operasional Kegiatan: Kurangnya sistem pengendalian dan evaluasi | ROO.26.36.10.09 | Aplikasi SIMELA dalam evaluasi Renja Perangkat Daerah | Masih sering terjadi kendala pada sistem informasi yang ada | Melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas sistem informasi yang terintegrasi | Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi | Juli 2026 |
| 10 | Risiko Kemitraan: Pelaporan evaluasi pembangunan tidak tepat waktu | ROO.26.36.10.10 | Surat Edaran Evaluasi Renja Triwulanan kepada Perangkat Daerah | Koordinasi antara mitra dengan OPD masih belum optimal | Penerapan SOP pelaporan secara ketat dan penerapan sistem reward & punishment dalam pelaporan kinerja | Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi | April 2026 |
| 11 | Risiko Fraud: Pertanggungjawaban biaya kegiatan tidak sesuai dengan realisasi di lapangan | ROO.26.36.10.11 | Perbup Nomor 87 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Perbendaharaan Keuangan Daerah | Verifikasi substansi kegiatan belum menyeluruh, masih terbatas pada aspek formal-administratif. | 1. Pengadministrasian bukti-bukti pengeluaran secara tertib dan memadai 2. Peningkatan fungsi verifikasi berjenjang | Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi | Desember 2026 |
| 12 | Risiko Operasional Kegiatan: Sistem Informasi Pemerintah Daerah tidak dapat digunakan secara maksimal | ROO.26.36.10.12 | Koordinasi secara berkala dengan Kemendagri dan Forum admin SIPD nasional | Kendala teknis dan perubahan kebijakan secara mendadak | Meningkatkan komunikasi dengan tim IT Kemendagri dan Perangkat Daerah untuk mengantisipasi perubahan kebijakan SIPD yang mendadak | Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi | Juli 2026 |
| 13 | Risiko Kemitraan: Mitra Perencanaan Pembangunan mengalami kendala dalam melakukan usulan melalui SIPD | ROO.26.36.10.13 | Sosialisasi SIPD kepada staf DPRD dan Pendamping Program Prioritas | Sosialisasi masih berfokus pada pedoman umum | Sosialisasi dan pemanfaatan tutorial penggunaan SIPD dalam proses perencanaan pembangunan daerah | Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi | Juni 2026 |
| 14 | Risiko Fraud: Kegiatan perjalanan dinas tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan | ROO.26.36.10.14 | Perbup Nomor 87 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Perbendaharaan Keuangan Daerah | Verifikasi pelaporan masih berfokus pada kelengkapan administrasi, belum pada kesesuaian substansi pelaksanaan kegiatan. | Penguatan koordinasi antara bidang teknis dan Subbag Keuangan untuk validasi kegiatan perjalanan dinas. | Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi | Juni 2026 |
| 15 | Risiko Operasional Kegiatan: Program prioritas bidang pemerintahan dan pembangunan manusia tidak terakomodir dalam dokumen perencanaan | ROO.26.36.10.15 | Asistensi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Perubahan kebijakan anggaran yang mendadak | Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah dan desk verifikasi program prioritas perangkat daerah | Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Juni 2026 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Pengendalian yang Sudah Ada | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/PJ | Target Waktu |
|----|---|-----------------|--|--|---|--|---------------|
| 16 | Risiko Kemitraan: Dokumen perencanaan perangkat daerah tidak sesuai dengan ketentuan | ROO.26.36.10.16 | Asistensi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Rendahnya komitmen perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan | Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah terkait penyusunan Dokumen perencanaan dan Asistensi kepada perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan SOP pedoman yang berlaku. | Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Juni 2026 |
| 17 | Risiko Fraud: Risiko pemecahan anggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa | ROO.26.36.10.17 | Perbup Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan | Sosialisasi pencegahan kecurangan dan edukasi kepada perencana/pengguna anggaran masih kurang. | 1. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi pencegahan kecurangan kepada pegawai yang terkait dengan perencanaan pengadaan barang dan jasa 2. Pakta integritas para pelaku pengadaan | Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Desember 2026 |
| 18 | Risiko Fraud: Pengeluaran kegiatan fiktif | ROO.26.36.10.18 | Perbup Nomor 87 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Perbendaharaan Keuangan Daerah | Monitoring ketepatan waktu penyusunan laporan dan dokumen pendukung kegiatan belum ketat. | 1. Monitoring ketepatan waktu penyusunan dan pengiriman dokumen SPJ fisik 2. Optimalisasi peran Pejabat Penatausahaan Keuangan dalam melakukan proses verifikasi SPJ | Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Desember 2026 |
| 19 | Risiko Fraud: Pertanggungjawaban biaya kegiatan tidak sesuai dengan realisasi di lapangan | ROO.26.36.10.19 | Perbup Nomor 87 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Perbendaharaan Keuangan Daerah | Verifikasi substansi kegiatan belum menyeluruh, masih terbatas pada aspek formal-administratif. | 1. Pengadministrasian bukti-bukti pengeluaran secara tertib dan memadai 2. Peningkatan fungsi verifikasi berjenjang | Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Desember 2026 |
| 20 | Risiko Fraud: Kegiatan perjalanan dinas tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan | ROO.26.36.10.20 | Perbup Nomor 87 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Perbendaharaan Keuangan Daerah | Verifikasi pelaporan masih berfokus pada kelengkapan administrasi, belum pada kesesuaian substansi pelaksanaan kegiatan. | Penguatan koordinasi antara bidang teknis dan Subbag Keuangan untuk validasi kegiatan perjalanan dinas. | Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Desember 2026 |
| 21 | Risiko Operasional Kegiatan: Program prioritas bidang pemerintahan dan pembangunan | ROO.26.36.10.21 | Asistensi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Perubahan kebijakan anggaran yang mendadak | Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah dan desk verifikasi program prioritas perangkat daerah | Kepala Bidang Perekonomian dan SDA | Juni 2026 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Pengendalian yang Sudah Ada | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/PJ | Target Waktu |
|----|---|-----------------|--|--|---|------------------------------------|---------------|
| | manusia tidak terakomodir dalam dokumen perencanaan | | | | | | |
| 22 | Risiko Kemitraan: Dokumen perencanaan perangkat daerah tidak sesuai dengan ketentuan | ROO.26.36.10.22 | Asistensi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Rendahnya komitmen perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan | Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah terkait penyusunan Dokumen perencanaan dan Asistensi kepada perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan SOP pedoman yang berlaku. | Kepala Bidang Perekonomian dan SDA | Juni 2026 |
| 23 | Risiko Fraud: Risiko pemecahan anggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa | ROO.26.36.10.23 | Perbup Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan | Sosialisasi pencegahan kecurangan dan edukasi kepada perencana/pengguna anggaran masih kurang. | 1. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi pencegahan kecurangan kepada pegawai yang terkait dengan perencanaan pengadaan barang dan jasa 2. Pakta integritas para pelaku pengadaan | Kepala Bidang Perekonomian & SDA | Desember 2026 |
| 24 | Risiko Fraud: Pengeluaran kegiatan fiktif | ROO.26.36.10.24 | Perbup Nomor 87 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Perbendaharaan Keuangan Daerah | Monitoring ketepatan waktu penyusunan laporan dan dokumen pendukung kegiatan belum ketat. | 1. Monitoring ketepatan waktu penyusunan dan pengiriman dokumen SPJ fisik 2. Optimalisasi peran Pejabat Penatausahaan Keuangan dalam melakukan proses verifikasi SPJ | Kepala Bidang Perekonomian & SDA | Desember 2026 |
| 25 | Risiko Fraud: Pertanggungjawaban biaya kegiatan tidak sesuai dengan realisasi di lapangan | ROO.26.36.10.25 | Perbup Nomor 87 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Perbendaharaan Keuangan Daerah | Verifikasi substansi kegiatan belum menyeluruh, masih terbatas pada aspek formal-administratif. | 1. Pengadministrasian bukti-bukti pengeluaran secara tertib dan memadai 2. Peningkatan fungsi verifikasi berjenjang | Kepala Bidang Perekonomian & SDA | Desember 2026 |
| 26 | Risiko Fraud: Kegiatan perjalanan dinas tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan | ROO.26.36.10.26 | Perbup Nomor 87 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Perbendaharaan Keuangan Daerah | Verifikasi pelaporan masih berfokus pada kelengkapan administrasi, belum pada kesesuaian substansi pelaksanaan kegiatan. | Penguatan koordinasi antara bidang teknis dan Subbag Keuangan untuk validasi kegiatan perjalanan dinas. | Kepala Bidang Perekonomian dan SDA | Desember 2026 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Pengendalian yang Sudah Ada | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/PJ | Target Waktu |
|----|--|-----------------|--|---|---|---|---------------|
| 27 | Risiko Operasional Kegiatan: Program prioritas bidang pemerintahan dan pembangunan manusia tidak terakomodir dalam dokumen perencanaan | ROO.26.36.10.27 | Asistensi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Perubahan kebijakan anggaran yang mendadak | Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah dan desk verifikasi program prioritas perangkat daerah | Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Juni 2026 |
| 28 | Risiko Kemitraan: Dokumen perencanaan perangkat daerah tidak sesuai dengan ketentuan | ROO.26.36.10.28 | Asistensi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Rendahnya komitmen perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan | Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah terkait penyusunan Dokumen perencanaan dan Asistensi kepada perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan SOP pedoman yang berlaku. | Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Juni 2026 |
| 29 | Risiko Fraud: Risiko pemecahan anggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa | ROO.26.36.10.29 | Perbup Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan | Sosialisasi pencegahan kecurangan dan edukasi kepada perencana/pengguna anggaran masih kurang. | 1. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi pencegahan kecurangan kepada pegawai yang terkait dengan perencanaan pengadaan barang dan jasa 2. Pakta integritas para pelaku pengadaan | Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Desember 2026 |
| 30 | Risiko Fraud: Pengeluaran kegiatan fiktif | ROO.26.36.10.30 | Perbup Nomor 87 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Perbendaharaan Keuangan Daerah | Monitoring ketepatan waktu penyusunan laporan dan dokumen pendukung kegiatan belum ketat. | 1. Monitoring ketepatan waktu penyusunan dan pengiriman dokumen SPJ fisik 2. Optimalisasi peran Pejabat Penatausahaan Keuangan dalam melakukan proses verifikasi SPJ | Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Desember 2026 |
| 31 | Risiko Fraud: Pertanggungjawaban biaya kegiatan tidak sesuai dengan realisasi di lapangan | ROO.26.36.10.31 | Perbup Nomor 87 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Perbendaharaan Keuangan Daerah | Verifikasi substansi kegiatan belum menyeluruh, masih terbatas pada aspek formal-administratif. | 1. Pengadministrasian bukti-bukti pengeluaran secara tertib dan memadai 2. Peningkatan fungsi verifikasi berjenjang | Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Desember 2026 |
| 32 | Risiko Fraud: Kegiatan perjalanan dinas tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan | ROO.26.36.10.32 | Perbup Nomor 87 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Perbendaharaan Keuangan Daerah | Verifikasi pelaporan masih berfokus pada kelengkapan administrasi, belum pada | Penguatan koordinasi antara bidang teknis dan Subbag Keuangan untuk validasi kegiatan perjalanan dinas. | Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Desember 2026 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Pengendalian yang Sudah Ada | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/PJ | Target Waktu |
|----|--|-----------------|---|---|--|----------------------|---------------|
| | | | | kesesuaian substansi pelaksanaan kegiatan. | | | |
| 33 | Risiko Operasional Kegiatan: Keterlambatan dalam pelaporan capaian kinerja secara berkala | ROO.26.36.10.33 | Koordinasi dengan bidang-bidang di internal BAPPERIDA | Belum semua realisasi kinerja disertai dengan bukti dukung | Menerapkan mekanisme portal pelaporan kinerja berbasis bukti dukung dan komunikasi secara intens dengan bidang-bidang terkait timeline monitoring dan evaluasi | Sekretaris BAPPERIDA | Juli 2026 |
| 34 | Risiko Kemitraan: Dokumen evaluasi kinerja yang disusun tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku | ROO.26.36.10.34 | Perpempan RB, Permendagri tentang penyusunan LKJIP, LPPD dan LKPJ | Peraturan tidak dipahami dengan baik | Meningkatkan koordinasi dengan PD terkait (Bagian Organisasi, BAPPERIDA & Inspektorat) dalam proses penyusunan dokumen evaluasi dan pelaporan | Sekretaris BAPPERIDA | Maret 2026 |
| 35 | Risiko Fraud: Pertanggungjawaban biaya kegiatan tidak sesuai dengan realisasi di lapangan | ROO.26.36.10.35 | Perbup Nomor 87 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Perbendaharaan Keuangan Daerah | Verifikasi substansi kegiatan belum menyeluruh, masih terbatas pada aspek formal-administratif. | 1. Pengadministrasian bukti-bukti pengeluaran secara tertib dan memadai 2. Peningkatan fungsi verifikasi berjenjang | Sekretaris BAPPERIDA | Desember 2026 |
| 36 | Risiko Operasional: Keterlambatan dalam pelaporan keuangan secara berkala | ROO.26.36.10.36 | Pemanfaatan SIPD dalam penatausahaan dan pencatatan | Sistem belum berjalan maksimal | Meningkatkan koordinasi dengan semua pegawai agar tepat waktu dalam pelaporan kegiatan dan penggunaan anggaran | Sekretaris BAPPERIDA | Desember 2026 |
| 37 | Risiko Kemitraan: Laporan keuangan yang disusun tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku | ROO.26.36.10.37 | Peraturan perundang-undangan terkait penyusunan Laporan keuangan | Peraturan tidak dipahami dengan baik | Meningkatkan koordinasi dengan BPKAD dalam proses penyusunan laporan keuangan | Sekretaris BAPPERIDA | Juli 2026 |
| 38 | Risiko Fraud: Pertanggungjawaban biaya kegiatan tidak sesuai dengan realisasi di lapangan | ROO.26.36.10.35 | Perbup Nomor 87 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Perbendaharaan Keuangan Daerah | Verifikasi substansi kegiatan belum menyeluruh, masih terbatas pada aspek formal-administratif. | 1. Pengadministrasian bukti-bukti pengeluaran secara tertib dan memadai 2. Peningkatan fungsi verifikasi berjenjang | Sekretaris BAPPERIDA | Desember 2026 |
| 39 | Risiko Operasional Kegiatan: Program pengembangan sumber daya manusia tidak optimal | ROO.26.36.10.39 | Mendorong pegawai untuk mengikuti berbagai kegiatan peningkatan | Kegiatan tidak terarah dan capaian tidak maksimal | Pelaksanaan bimbingan teknis bagi SDM BAPPERIDA terkait dengan pengembangan kompetensi jabatan pegawai | Sekretaris BAPPERIDA | Juni 2026 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Pengendalian yang Sudah Ada | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/PJ | Target Waktu |
|----|---|-----------------|---|---|---|----------------------|---------------|
| | | | kompetensi secara mandiri | | | | |
| 40 | Risiko Kemitraan: Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas kepegawaian tidak sesuai dengan peta pengembangan kompetensi | ROO.26.36.10.40 | MoU dengan lembaga diklat atau BKPSDM | Penyusunan kurikulum diklat masih belum update | Meningkatkan koordinasi dalam perencanaan kegiatan bimtek dengan kurikulum diklat yang sesuai | Sekretaris BAPPERIDA | Juni 2026 |
| 41 | Risiko Fraud: Pertanggungjawaban biaya kegiatan tidak sesuai dengan realisasi di lapangan | ROO.26.36.10.35 | Perbup Nomor 87 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Perbendaharaan Keuangan Daerah | Verifikasi substansi kegiatan belum menyeluruh, masih terbatas pada aspek formal-administratif. | 1. Pengadministrasian bukti-bukti pengeluaran secara tertib dan memadai 2. Peningkatan fungsi verifikasi berjenjang | Sekretaris BAPPERIDA | Desember 2026 |
| 42 | Risiko Operasional Kegiatan: Inefisiensi administrasi umum perangkat daerah | ROO.26.36.10.42 | Pemanfaatan aplikasi E-Persediaan | Sering terjadi kendala pada sistem | Melakukan koordinasi dengan BPKAD terkait pemanfaatan aplikasi | Sekretaris BAPPERIDA | Desember 2026 |
| 43 | Risiko Kemitraan: Pengadaan Barang Habis Pakai tidak sesuai dengan spesifikasi | ROO.26.36.10.43 | Penyusunan RKA belanja | Spesifikasi kurang jelas | Menyusun rencana pengadaan dengan spesifikasi yang jelas dan mengkomunikasikannya kepada rekanan | Sekretaris BAPPERIDA | Desember 2026 |
| 44 | Risiko Fraud: Penggunaan aset dan persediaan BAPPERIDA secara tidak sah untuk kepentingan pribadi pegawai/pejabat BAPPERIDA | ROO.26.36.10.44 | Perda Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah | Pengawasan penggunaan aset masih terbatas, integritas pegawai belum sepenuhnya terjaga. | 1. Sosialisasi pengendalian gratifikasi oleh Unit Pengendalian Gratifikasi di BAPPERIDA 2. Penguatan WBS di lingkungan BAPPERIDA 3. Penandatanganan pakta integritas dalam rangka pelaksanaan audit | Sekretaris BAPPERIDA | April 2026 |
| 45 | Risiko Kemitraan: Barang yang diperoleh melalui pengadaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. | ROO.26.36.10.45 | Penyusunan RKA belanja | Spesifikasi kurang jelas | Memastikan bahwa barang yang diterima telah sesuai dengan BAST. Melibatkan pihak yang berkompeten dalam menentukan dan memeriksa spesifikasi barang. | Sekretaris BAPPERIDA | Desember 2026 |
| 46 | Risiko Operasional Kegiatan: Barang yang dicari tidak dapat ditemukan pada marketplace | ROO.26.36.10.46 | Kerjasama dengan rekanan penyedia barang | Barang tidak tersedia | Melakukan kerjasama dengan rekanan lain yang dapat menyediakan barang sesuai dengan spesifikasi | Sekretaris BAPPERIDA | Desember 2026 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Pengendalian yang Sudah Ada | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/PJ | Target Waktu |
|----|---|-----------------|--|---|---|----------------------|---------------|
| 47 | Risiko Fraud: Anggaran/Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan barang dan jasa ditinggikan (mark up) | ROO.26.36.10.47 | Perbup Nomor 22 Tahun 2024 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun 2025; Perbup Nomor 18 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025 | Peran konsultan perencana dan tim teknis dalam penyusunan HPS masih kurang optimal, serta belum ada integrasi kuat dengan pakta integritas. | 1. Optimalisasi peran konsultan perencana dan tim teknis dalam penyusunan HPS 2. Penandatanganan Pakta Integritas bagi pihak yang terkait dalam penganggaran dan penyusunan HPS PBJ | Sekretaris BAPPERIDA | Desember 2026 |
| 48 | Risiko Fraud: PA/KPA dan PPK menerima gratifikasi dari calon rekanan atau rekanan | ROO.26.36.10.48 | Perbup Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan | Mekanisme pengendalian dan pemantauan kepatuhan masih terbatas sehingga praktik gratifikasi masih berpotensi terjadi. | 1. Sosialisasi pengendalian gratifikasi oleh Unit Pengendalian Gratifikasi di BAPPERIDA 2. Penandatanganan pakta integritas dalam rangka pengadaan barang dan jasa | Sekretaris BAPPERIDA | Desember 2026 |
| 49 | Risiko Kemitraan: Kurangnya kualitas atau tidak optimalnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | ROO.26.36.10.49 | SOP Pengadaan BMD | SOP belum dilaksanakan dengan maksimal | Peningkatan implementasi SOPD Pengadaan Barang Milik Daerah secara optimal | Sekretaris BAPPERIDA | Desember 2026 |
| 50 | Risiko Operasional Kegiatan: Terjadinya kendala dalam penyediaan utilitas penunjang perkantoran | ROO.26.36.10.50 | SPK dengan mitra penyedia layanan | Keadaan force majeure | Menjalin kerjasama dengan pihak rekanan untuk mengatasi gangguan utilitas secara mendadak (misal gangguan listrik dan perpipaan) | Sekretaris BAPPERIDA | Desember 2026 |
| 51 | Risiko Fraud: Pertanggungjawaban biaya kegiatan tidak sesuai dengan realisasi di lapangan | ROO.26.36.10.35 | Perbup Nomor 87 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Perbendaharaan Keuangan Daerah | Verifikasi substansi kegiatan belum menyeluruh, masih terbatas pada aspek formal-administratif. | 1. Pengadministrasian bukti-bukti pengeluaran secara tertib dan memadai 2. Peningkatan fungsi verifikasi berjenjang | Sekretaris BAPPERIDA | Desember 2028 |
| 52 | Risiko Operasional Kegiatan: Barang milik daerah tidak dapat digunakan secara maksimal | ROO.26.36.10.52 | SOP Pemeliharaan BMD | SOP belum dilaksanakan dengan maksimal | Peningkatan implementasi SOPD Pemeliharaan Barang Milik Daerah secara optimal | Sekretaris BAPPERIDA | Desember 2026 |
| 53 | Risiko Kemitraan: Kerusakan barang milik daerah tidak tertangani | ROO.26.36.10.51 | Perencanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas | Kerusakan mendadak | Menjalin kerjasama dengan rekanan untuk kegiatan perbaikan BMD/Kendaraan dinas | Sekretaris BAPPERIDA | Desember 2026 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Pengendalian yang Sudah Ada | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/PJ | Target Waktu |
|----|--|-----------------|---|--|---|---------------------------------|---------------|
| 54 | Risiko Fraud: Penyalahgunaan/penggelapan aset milik BAPPERIDA | ROO.26.36.10.53 | Perda Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah | Mekanisme pengawasan dan verifikasi keberadaan fisik aset masih kurang kuat sehingga celah penyalahgunaan tetap ada. | 1. Sosialisasi pengendalian gratifikasi oleh Unit Pengendalian Gratifikasi di BAPPERIDA 2. Penguatan WBS di lingkungan BAPPERIDA 3. Penandatanganan pakta integritas dalam rangka pelaksanaan audit | Sekretaris BAPPERIDA | Desember 2026 |
| 55 | Risiko Operasional Kegiatan: Hasil penelitian tidak diakomodir sebagai dasar perumusan kebijakan | ROO.26.36.10.54 | Diseminasi hasil penelitian kepada stakeholders dan perangkat daerah terkait | Rekomendasi belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh OPD | Mendorong pimpinan dan stakeholders untuk meningkatkan komitmen dan dukungan terhadap perumusan kebijakan berbasis bukti | Kepala Bidang Riset dan Inovasi | Desember 2026 |
| 56 | Risiko Kemitraan: Kerjasama penelitian bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan tidak dapat dilaksanakan | ROO.26.36.10.55 | MoU dengan instansi Perguruan Tinggi | Kompetensi tenaga peneliti kurang memadai | Memperluas jaringan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan institusi penelitian lainnya. | Kepala Bidang Riset dan Inovasi | Desember 2026 |
| 57 | Risiko Fraud: Kegiatan perjalanan dinas tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan | ROO.26.36.10.56 | Perbup Nomor 87 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Perbendaharaan Keuangan Daerah | Verifikasi pelaporan masih berfokus pada kelengkapan administrasi, belum pada kesesuaian substansi pelaksanaan kegiatan. | Penguatan koordinasi antara bidang teknis dan Subbag Keuangan untuk validasi kegiatan perjalanan dinas. | Kepala Bidang Riset dan Inovasi | Desember 2026 |
| 58 | Risiko Kebijakan: Hasil penelitian tidak diakomodir sebagai dasar perumusan kebijakan di bidang sosial dan kependudukan | ROO.26.36.10.57 | Diseminasi hasil penelitian kepada stakeholders dan perangkat daerah terkait | Potensi Hasil penelitian tidak diakomodir | Mendorong pimpinan perangkat daerah untuk meningkatkan komitmen dan dukungan terhadap pelaksanaan rekomendasi hasil penelitian bidang social dan kependudukan | Kepala Bidang Riset dan Inovasi | Desember 2026 |
| 59 | Risiko Kemitraan: Kerjasama penelitian bidang sosial dan kependudukan tidak dapat dilaksanakan | ROO.26.36.10.58 | MoU dengan instansi Perguruan Tinggi | Kompetensi tenaga peneliti kurang memadai | Memperluas jaringan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan institusi penelitian lainnya. | Kepala Bidang Riset dan Inovasi | Desember 2026 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Pengendalian yang Sudah Ada | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/PJ | Target Waktu |
|----|---|-----------------|--|--|--|---------------------------------|---------------|
| 60 | Risiko Fraud: Risiko pemecahan anggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa | ROO.26.36.10.59 | Perbup Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan | Sosialisasi pencegahan kecurangan dan edukasi kepada perencana/pengguna anggaran masih kurang. | 1. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi pencegahan kecurangan kepada pegawai yang terkait dengan perencanaan pengadaan barang dan jasa 2. Pakta integritas para pelaku pengadaan | Kepala Bidang Riset dan Inovasi | Desember 2026 |
| 61 | Risiko Kebijakan: Hasil penelitian tidak diakomodir sebagai dasar perumusan kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan | ROO.26.36.10.60 | Diseminasi hasil penelitian kepada stakeholders dan perangkat daerah terkait | Potensi Hasil penelitian tidak diakomodir | Mendorong pimpinan perangkat daerah untuk meningkatkan komitmen dan dukungan terhadap pelaksanaan rekomendasi hasil penelitian bidang social dan kependudukan | Kepala Bidang Riset dan Inovasi | Desember 2026 |
| 62 | Risiko Kemitraan: Kerjasama penelitian bidang ekonomi dan pembangunan tidak dapat dilaksanakan | ROO.26.36.10.61 | MoU dengan instansi Perguruan Tinggi | Kompetensi tenaga peneliti kurang memadai | Memperluas jaringan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan institusi penelitian lainnya. | Kepala Bidang Riset dan Inovasi | Desember 2026 |
| 63 | Risiko Fraud: Pengeluaran kegiatan fiktif | ROO.26.36.10.62 | Perbup Nomor 87 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Perbendaharaan Keuangan Daerah | Monitoring ketepatan waktu penyusunan laporan dan dokumen pendukung kegiatan belum ketat. | 1. Monitoring ketepatan waktu penyusunan dan pengiriman dokumen SPJ fisik 2. Optimalisasi peran Pejabat Penatausahaan Keuangan dalam melakukan proses verifikasi SPJ | Kepala Bidang Riset dan Inovasi | Desember 2026 |
| 64 | Risiko Kebijakan: Inovasi yang dikembangkan tidak dapat diimplementasikan secara berkelanjutan | ROO.26.36.10.63 | Sosialisasi inovasi pelayanan publik pada setiap perangkat daerah dan unit pelayanan publik | Kegiatan hanya berfokus pada sosialisasi inovasi secara umum | Mendorong pimpinan unit pelayanan publik dan inovator terkait untuk meningkatkan komitmen dan dukungan dalam implementasi inovasi secara berkelanjutan | Kepala Bidang Riset dan Inovasi | Desember 2026 |
| 65 | Risiko Kemitraan: Inovasi yang dilaksanakan oleh unit pelayanan publik tidak memenuhi kriteria kematangan inovasi | ROO.26.36.10.64 | Sosialisasi persiapan penilaian IGA Kemendagri | Kegiatan hanya berfokus pada sosialisasi inovasi secara umum | Melakukan pendampingan kepada unit pelayanan publik dalam memenuhi kriteria kematangan inovasi | Kepala Bidang Riset dan Inovasi | November 2026 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Pengendalian yang Sudah Ada | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/PJ | Target Waktu |
|----|--|-----------------|---|--|---|---------------------------------|---------------|
| 66 | Risiko Fraud: Pertanggungjawaban biaya kegiatan tidak sesuai dengan realisasi di lapangan | ROO.26.36.10.65 | Perbup Nomor 87 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Perbendaharaan Keuangan Daerah | Verifikasi substansi kegiatan belum menyeluruh, masih terbatas pada aspek formal-administratif. | 1. Pengadministrasian bukti-bukti pengeluaran secara tertib dan memadai 2. Peningkatan fungsi verifikasi berjenjang | Kepala Bidang Riset dan Inovasi | Desember 2026 |
| 67 | Risiko Operasional Kegiatan: Kegiatan kelitbangan yang difasilitasi tidak sesuai dengan arah kebijakan kelitbangan | ROO.26.36.10.66 | Rencana Induk dan Peta Jalan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Daerah | Kurangnya sosialisasi dokumen RIPJPID | Sosialisasi RIPJPID kepada mitra kelitbangan | Kepala Bidang Riset dan Inovasi | Desember 2026 |
| 68 | Risiko Kemitraan: Rekomendasi kegiatan penelitian dan pengembangan tidak dapat diterbitkan | ROO.26.36.10.67 | Standar Pelayanan Penerbitan Izin Rekomendasi | Standar Pelayanan tidak tersosialisasikan dengan baik | Mengintensifkan sosialisasi standar pelayanan kepada mitra penelitian | Kepala Bidang Riset dan Inovasi | Mei 2026 |
| 69 | Risiko Fraud: Kegiatan perjalanan dinas tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan | ROO.26.36.10.56 | Perbup Nomor 87 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Perbendaharaan Keuangan Daerah | Verifikasi pelaporan masih berfokus pada kelengkapan administrasi, belum pada kesesuaian substansi pelaksanaan kegiatan. | Penguatan koordinasi antara bidang teknis dan Subbag Keuangan untuk validasi kegiatan perjalanan dinas. | Kepala Bidang Riset dan Inovasi | Desember 2026 |
| 70 | Risiko Operasional Kegiatan: Pengembangan inovasi yang difasilitasi tidak mendapatkan legitimasi | ROO.26.36.10.69 | Pendampingan Inovasi pada IGA, Inotek Award/Kovablik | Pendampingan kurang intens | Optimalisasi kegiatan pendampingan bagi inovator baik OPD maupun masyarakat umum | Kepala Bidang Riset dan Inovasi | Desember 2026 |
| 71 | Risiko Kemitraan: Inovasi yang dikembangkan oleh mitra tidak diimplementasikan secara berkelanjutan | ROO.26.36.10.70 | Pendampingan unit pelayanan publik dalam pelaksanaan inovasi | Pendampingan kurang intens | Pemberian insentif kepada inovator dan instansi dengan inovasi terbaik | Kepala Bidang Riset dan Inovasi | Desember 2026 |
| 72 | Risiko Fraud: Kegiatan perjalanan dinas tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan | ROO.26.36.10.56 | Perbup Nomor 87 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Perbendaharaan Keuangan Daerah | Verifikasi pelaporan masih berfokus pada kelengkapan administrasi, belum pada kesesuaian substansi pelaksanaan kegiatan. | Penguatan koordinasi antara bidang teknis dan Subbag Keuangan untuk validasi kegiatan perjalanan dinas. | Kepala Bidang Riset dan Inovasi | Desember 2026 |

BAB IV RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Dalam konteks Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lamongan (BAPPERIDA), rancangan informasi dan komunikasi menjadi krusial dalam mendukung efektivitas pengendalian risiko. Berikut adalah deskripsi dari berbagai elemen rancangan informasi dan komunikasi yang diperlukan:

- Rapat Koordinasi Internal
- Surat Edaran
- Bimbingan Teknis
- Monitoring Implementasi
- Pelatihan dan Diklat
- Sistem Aplikasi
- Sosialisasi
- Pengaturan MOU
- Kontrak
- Proposal
- Kebijakan

BAB V RANCANGAN PEMANTAUAN

Mekanisme pemantauan yang akan diimplementasikan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau dengan tepat dan pengendalian yang telah dirancang dapat dijalankan dan berjalan efektif. Mekanisme pemantauan yang akan digunakan meliputi:

1. Konfirmasi Persiapan:

Sebelum pelaksanaan setiap kegiatan atau proyek, akan dilakukan konfirmasi persiapan untuk memastikan bahwa semua pengendalian yang diperlukan telah dipersiapkan dengan baik. Konfirmasi persiapan melibatkan verifikasi bahwa langkah-langkah mitigasi risiko yang telah direncanakan telah dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

2. Laporan Pelaksanaan Kegiatan:

Setelah kegiatan atau proyek selesai dilaksanakan, akan disusun laporan pelaksanaan kegiatan yang mencakup evaluasi terhadap implementasi pengendalian risiko yang telah direncanakan. Laporan pelaksanaan kegiatan ini akan memuat informasi mengenai pelaksanaan pengendalian, potensi permasalahan yang dihadapi, serta langkah-langkah perbaikan yang telah atau akan dilakukan.

BAB VI PENUTUP

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola risiko-risiko yang terkait dengan pembangunan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lamongan (BAPPERIDA) telah menguraikan dan menerapkan berbagai strategi dan mekanisme pengendalian risiko yang telah dirancang. Dengan komitmen yang kuat dan kerja keras seluruh jajaran, diharapkan upaya-upaya ini dapat memberikan kontribusi positif dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Sebagai penutup, kami ingin menyatakan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan dan implementasi penilaian risiko serta pengelolaan risiko di lingkungan BAPPERIDA Kabupaten Lamongan. Dengan kerjasama dan dedikasi dari semua pihak, kami yakin bahwa BAPPERIDA Kabupaten Lamongan akan terus menjadi motor penggerak pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi di masa yang akan datang.

Lamongan, Januari 2026

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan
Inovasi Daerah
Kabupaten Lamongan



Dr. Sujarwo, ST., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19740930 200112 1 005